



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang Tahun Anggaran 2022 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan yang diemban oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai mana diatur dalam dalam Peraturan Menteri aparatur Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, dijelaskan juga upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan program/kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2022 yang berorientasi pada misi dan visi pemerintah Kota Serang, keberhasilan pada tahun 2022 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022.

Serang, Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



NOFRIADY EKA PUTRA, ST. MM. MH.

NIP. 19781123 200604 1 002

DAFTAR ISI

.....

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI i

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Maksud dan Tujuan..... 1

1.3. Landasan Hukum..... 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

1.5 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah 3

 a. Tugas, Fungsi, dan Struktur..... 4

 b. Sumber Daya Perangkat Daerah 5

 c. Isu Strategis dan Permasalahan Daerah 6

BAB II..... 15

PERENCANAAN KINERJA..... 15

2.1 Rencana Strategis DPKP 2018 - 2023..... 15

2.2 Rencana Kerja Tahun 2022 36

2.3 Indikator Kerja Utama..... 66

2.4 Perjanjian Kinerja DPKP Tahun 2022 67

2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja DPKP Tahun 2022 69

BAB III..... 73

AKUNTABILITAS KINERJA 73

3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... 73

 3.1.1 Persentase Kawasan Kumuh..... 78

 3.1.2 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata 81

 3.1.3 Rasio Rumah Layak Huni 83

 3.1.4 Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah 85

3.1.5 Cakupan Layanan Adminsistrasi Pertanahan 92

3.1.6 Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 93

3.2 Realisasi Anggaran 90

3.3 Penghargaan 96

 Gambar 3.1 Piagam Penghargaan 96

BAB IV96

TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 202096

BAB V98

PENUTUP98

DAFTAR TABEL



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022

.....

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI..... i

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 1

1.3. Landasan Hukum 2

1.4 Sistematika Penulisan..... 3

1.5 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah 3

 a. Tugas, Fungsi, dan Struktur 4

 b. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 5

 Tabel 1.1 Jumlah ASN berdasarkan jabatan 5

 Tabel 1.2 Jenjang Pendidikan ASN di lingkungan DPKP 6

 c. Isu Strategis dan Permasalahan Daerah 6

BAB II..... 15

PERENCANAAN KINERJA..... 15

2.1 Rencana Strategis DPKP 2018 - 2023 15

 Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2018 - 2023 15

2.2 Rencana Kerja Tahun 2022 36

 Tabel 2.2 Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 37

2.3 Indikator Kerja Utama 66

 Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama DPKP Kota Serang 66

2.4 Perjanjian Kinerja DPKP Tahun 2022 67

 Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
 Serang 67

2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja DPKP Tahun 2022 69

 Tabel 2.5 Rencana Aksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 69

BAB III 73

AKUNTABILITAS KINERJA 73

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 73

 Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 74

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	77
3.1.1 Persentase Kawasan Kumuh.....	78
Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2022	78
Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2018 – 2023	79
Tabel 3.5 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.....	80
Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2022	81
3.1.2 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata.....	81
Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata Tahun 2022	82
Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata Tahun 2018 – 2023	83
3.1.3 Rasio Rumah Layak Huni.....	83
Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Kinerja Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2022.....	83
Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018 – 2023	84
3.1.4 Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah	85
Tabel 3.11 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Perumahan yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2022	85
Tabel 3.12 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Perumahan yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2018 – 2023	86
Tabel 3.13 Data Perumahan yang Sudah Menyerahkan Aset PSU nya	86
3.1.5 Cakupan Layanan Adminsistrasi Pertanahan	92
Tabel 3.14 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan Tahun 2022	92
Tabel 3.15Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan Tahun 2018 – 2023	93
Tabel 3.16 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan Tahun 2018 - 2023	93
3.1.6 Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.....	93
Tabel 3.17 Pencapaian Indikator Capaian Peningkatan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	94
3.2 Realisasi Anggaran.....	90
Tabel 3.18 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2022	90
Tabel 3.19 Pencapaian Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran dengan Kinerja Tahun 2022	92

3.3 Penghargaan 96



Gambar 3.1 Piagam Penghargaan 96

BAB IV 96

TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2020 96

 Tabel 4.1 Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat 96

BAB V 98

PENUTUP 98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, bahwa setiap organisasi publik pada saat ini lebih terbuka dan memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik secara tertulis periodik dan melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawabannya. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi publik harus menyusun dan memiliki suatu rencana strategis yang merupakan alat untuk menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Rencana kinerja yang merupakan proses penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan, serta laporan pertanggungjawaban kinerja organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 yang disusun ini merupakan uraian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada awal Tahun anggaran 2022. Kegiatan/program tahunan tersebut merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus dirinci kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan terfokus.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini adalah :

- a) Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP Tahun 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah tercapai selama Tahun 2022.
- b) Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal Organisasi, menjadikan LKjIP Tahun 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kota Serang sebagai upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, untuk setiap celah kerja yang ditemukan, manajemen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat merumuskan strategi dan pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 28 tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang;
9. Peraturan Walikota Serang Nomor 980/Kep.298-Huk/2018 Tentang Penerimaan Bantuan Rumah Rumah Swadaya Berupa Uang;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang.

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjelaskan pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang selama tahun 2022. Capaian kinerja tersebut juga dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya untuk mengukur keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang selama tahun 2022. Selain itu, capaian kinerja tahun 2022 juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan kerangka pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Gambaran Pelayanan Umum Instansi Pemerintah
 - a. Tugas, Fungsi, dan Struktur;
 - b. Sumber Daya Organisasi;
 - c. Isu Strategis dan Permasalahan Daerah.

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kerja
- 2.3. Indikator Kinerja Utama
- 2.4. Perjanjian Kinerja
- 2.5. Rencana Aksi

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran
- 3.3. Daftar Penghargaan

Bab IV Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Evaluasi Tahun 2021

Bab V Penutup

1.5 Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Serang yang awalnya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang namun karena terdapat penambahan kewenangan terkait pertanahan dan pemindahan kewenangan terkait ruang terbuka hijau, sanitasi dan air minum ke Dinas PUPR maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur

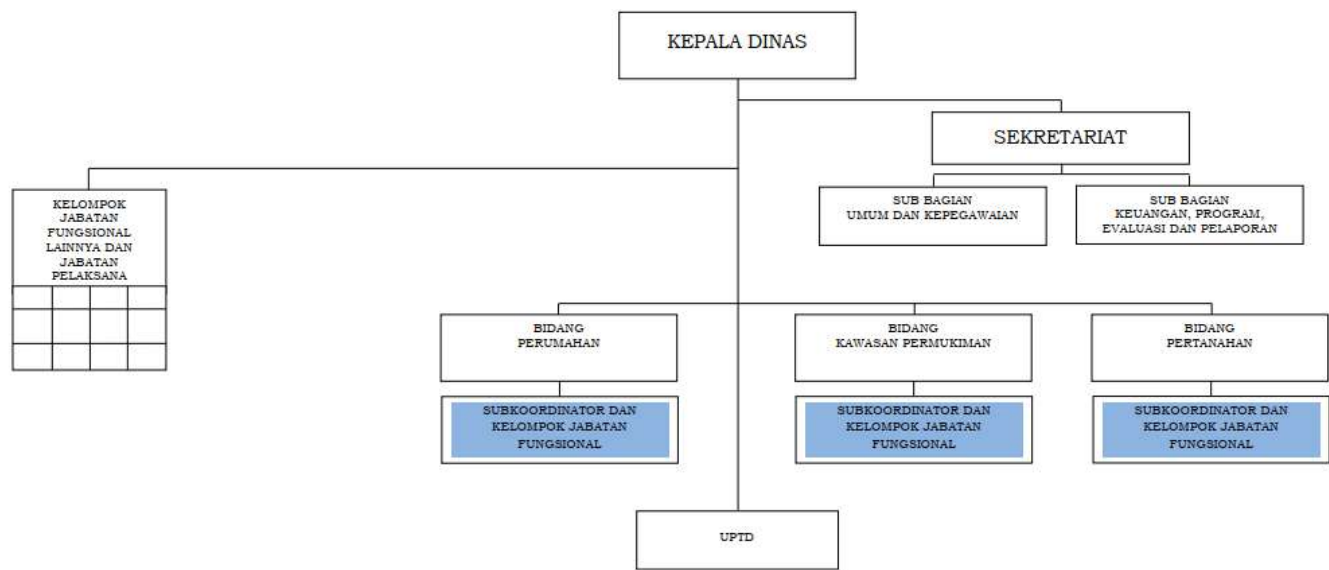
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi tiga orang Kepala Bidang dan seorang Sekretaris. Berikut susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perumahan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pertanahan, membawahkan Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD Rusunawa;
- g. Kelompok jabatan fungsional;
- h. Jabatan Pelaksana.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijalankan oleh 30 orang ASN yang juga dibantu sebanyak 91 orang. Berikut rincian ASN di lingkungan DPKP Kota Serang dan berdasarkan pendidikannya.

Tabel 1.1 Jumlah ASN berdasarkan jabatan

NO.	PEGAWAI ASN	JUMLAH	SATUAN
1	Kepala Dinas	1	Orang
2	Sekretaris	1	Orang
3	Kepala Bidang	3	Orang
4	Kepala Sub Bagian	4	Orang
5	Sub Koordinator / Jabatan Fungsional	9	Orang
6	Kepala UPT Rusunawa	1	Orang
7	Pelaksana Golongan IV	0	Orang
8	Pelaksana Golongan III	12	Orang
9	Pelaksana Golongan II	6	Orang
JUMLAH		37	Orang

Tabel 1.2 Jenjang Pendidikan ASN di lingkungan DPKP

Ø Strata Dua (S2)	:	10	Orang
Ø Strata Satu (S1)	:	21	Orang
Ø Diploma Tiga (D3)	:	1	Orang
Ø SLTA	:	5	Orang
JUMLAH	:	37	Orang

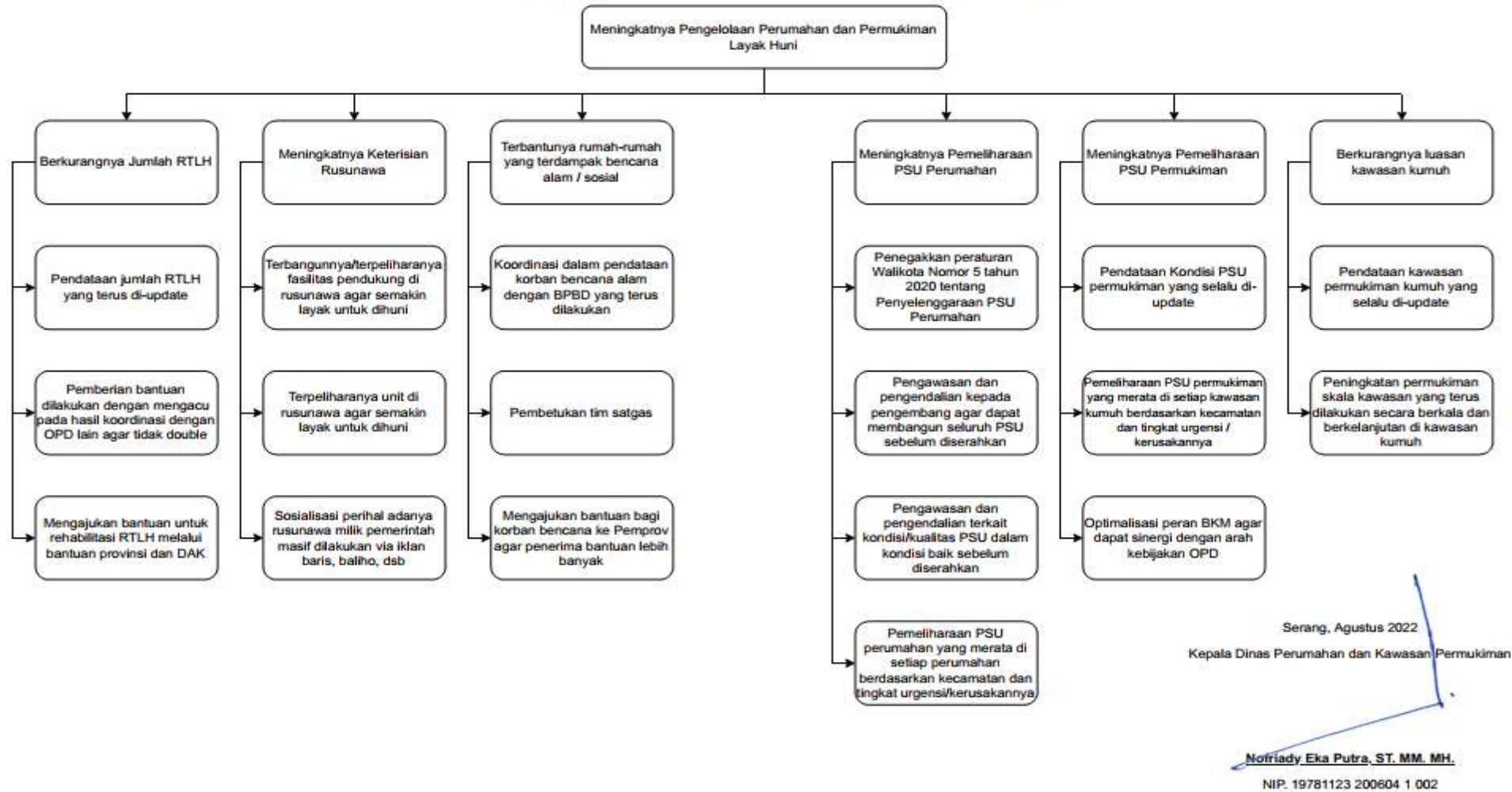
c. Isu Strategis dan Permasalahan Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi yang sebelumnya sudah dipaparkan, berikut isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPKP:

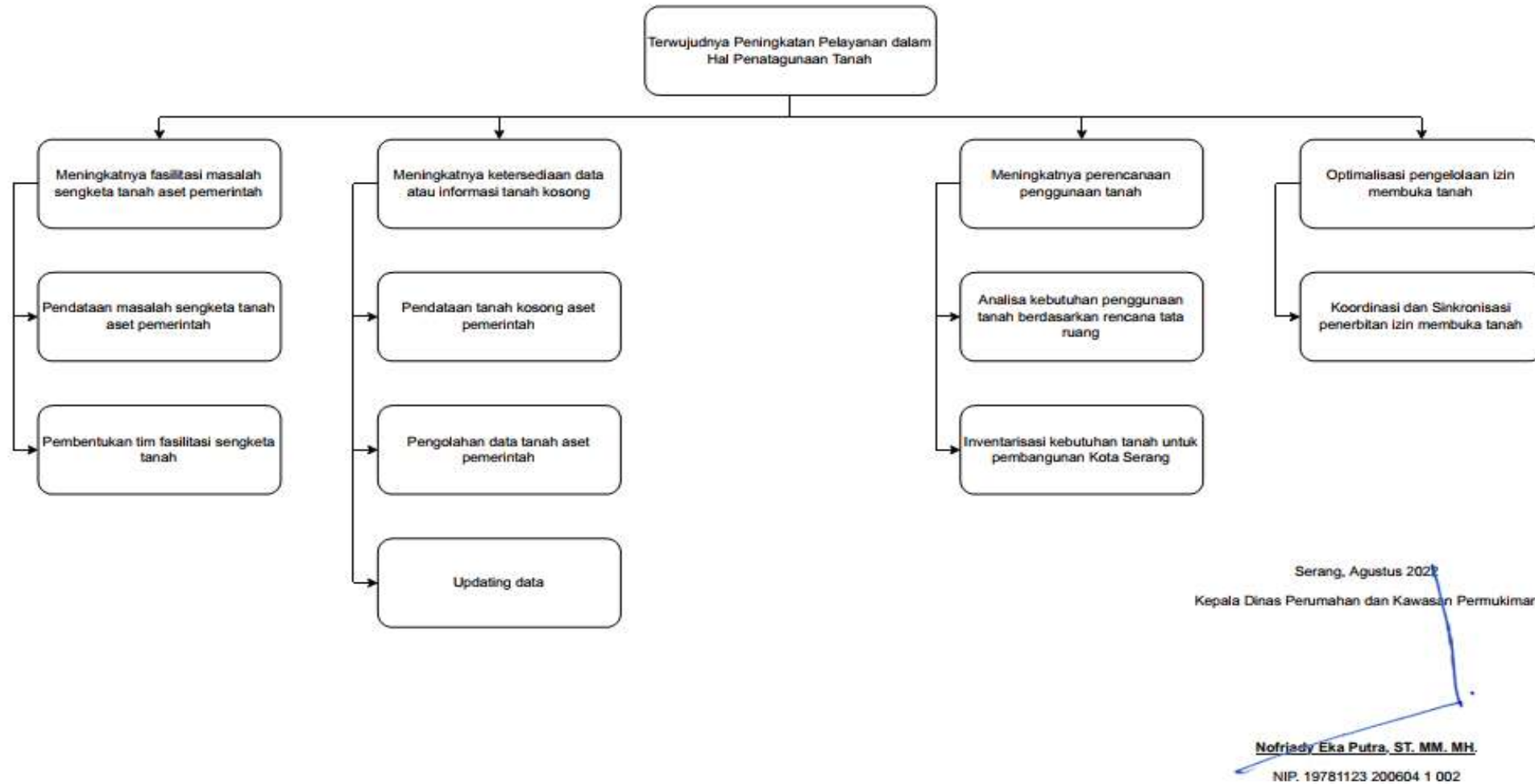
1. Optimalisasi Penyerahan PSU;
2. Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan;
3. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Perumahan yang Layak dan Terjangkau;
4. Optimalisasi Pengembangan Satuan Lingkungan dan Prasarana Dasar Permukiman;
5. Penurunan Kualitas Lingkungan Permukiman pada Kawasan Kumuh;
6. Belum optimalnya urusan pertanahan.

Berdasarkan keenam point di atas, Berikut pohon kinerja, *cross cutting*, dan *cascading* dari isu strategis dan permasalahan daerah di atas:

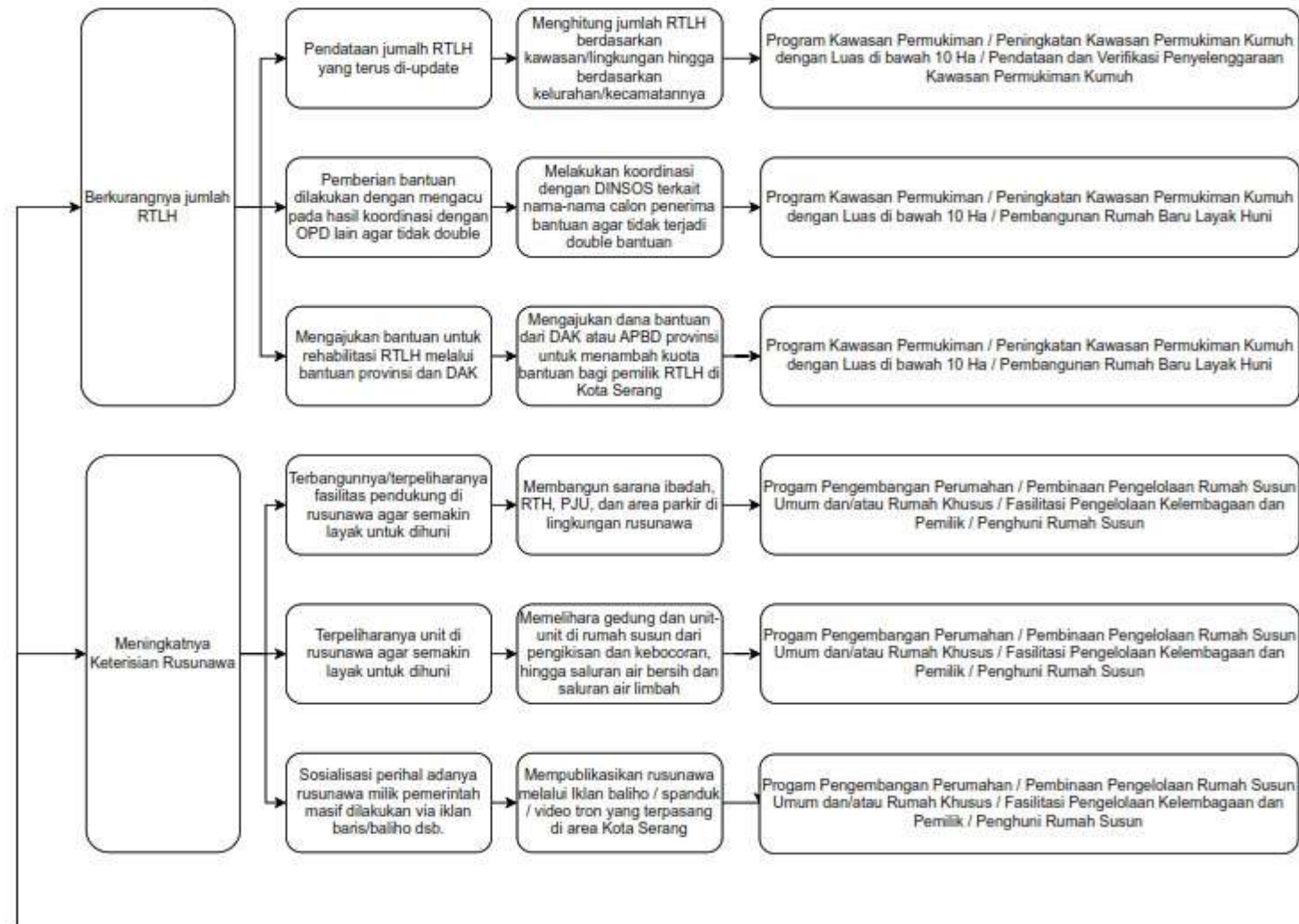
**POHON KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SERANG**

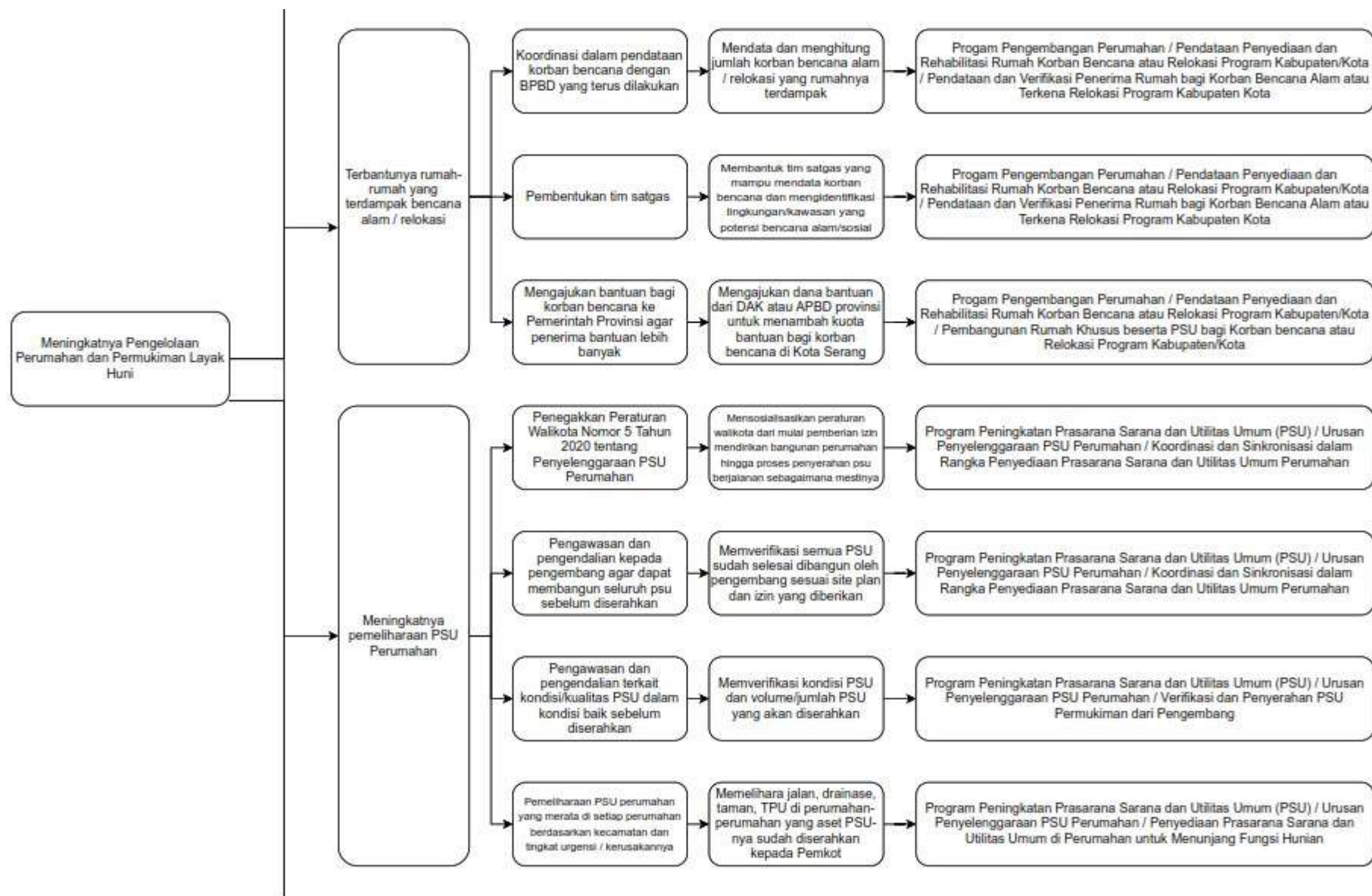


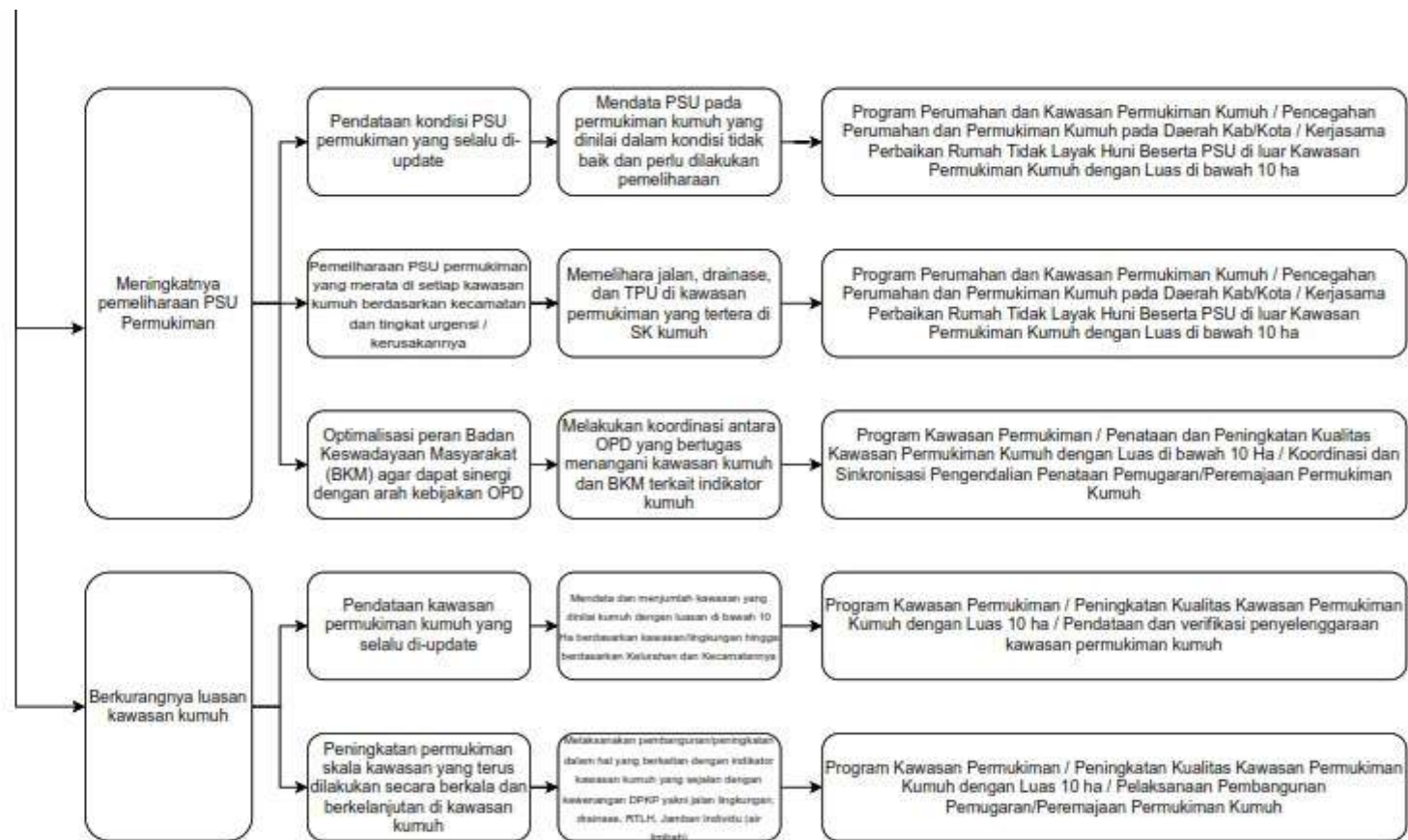
POHON KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SERANG



CASCADING URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SERANG





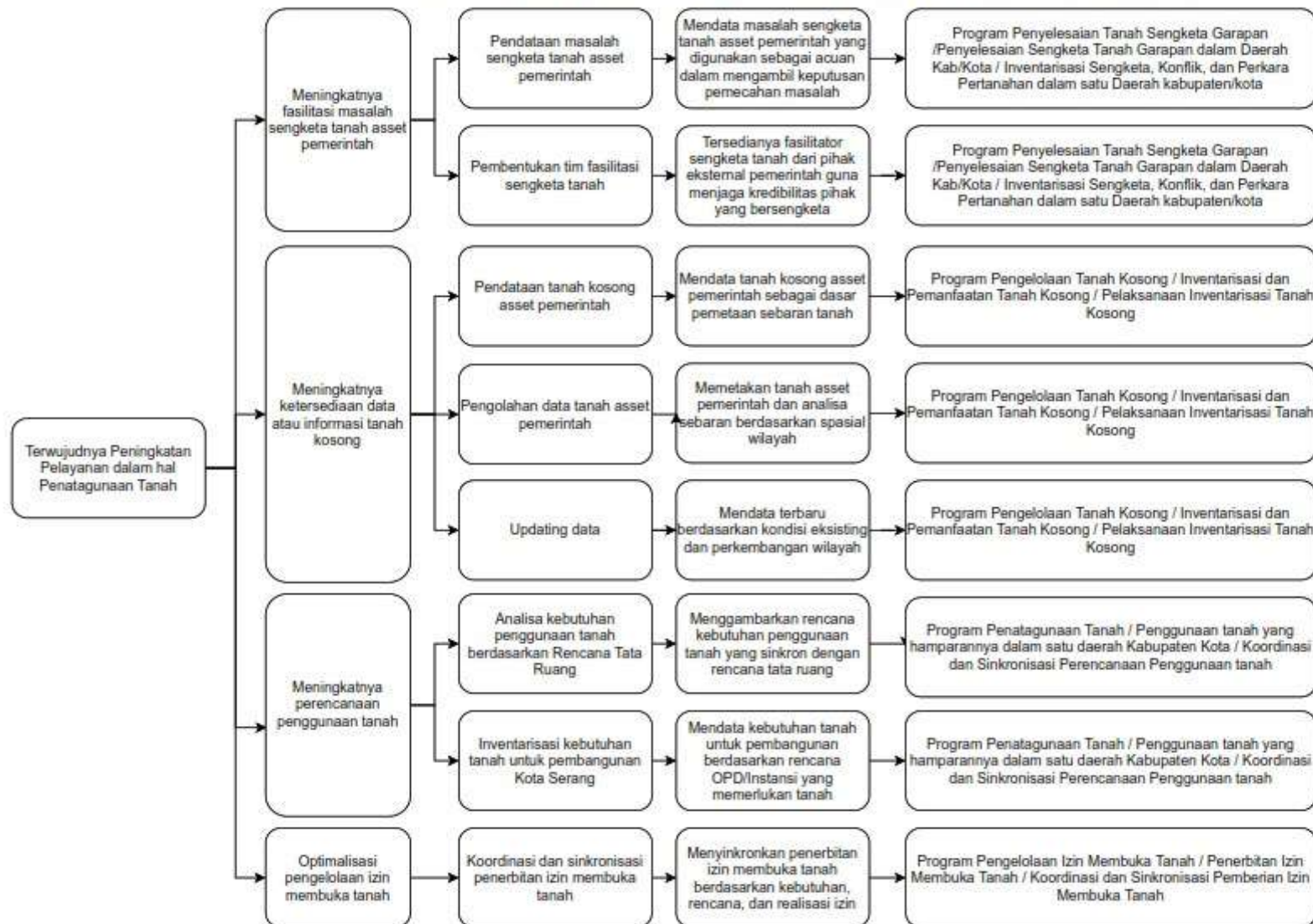


Serang, Agustus 2022
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nofriady Eka Putra, ST. MM. MH

NIP. 19781123 200604 1 002

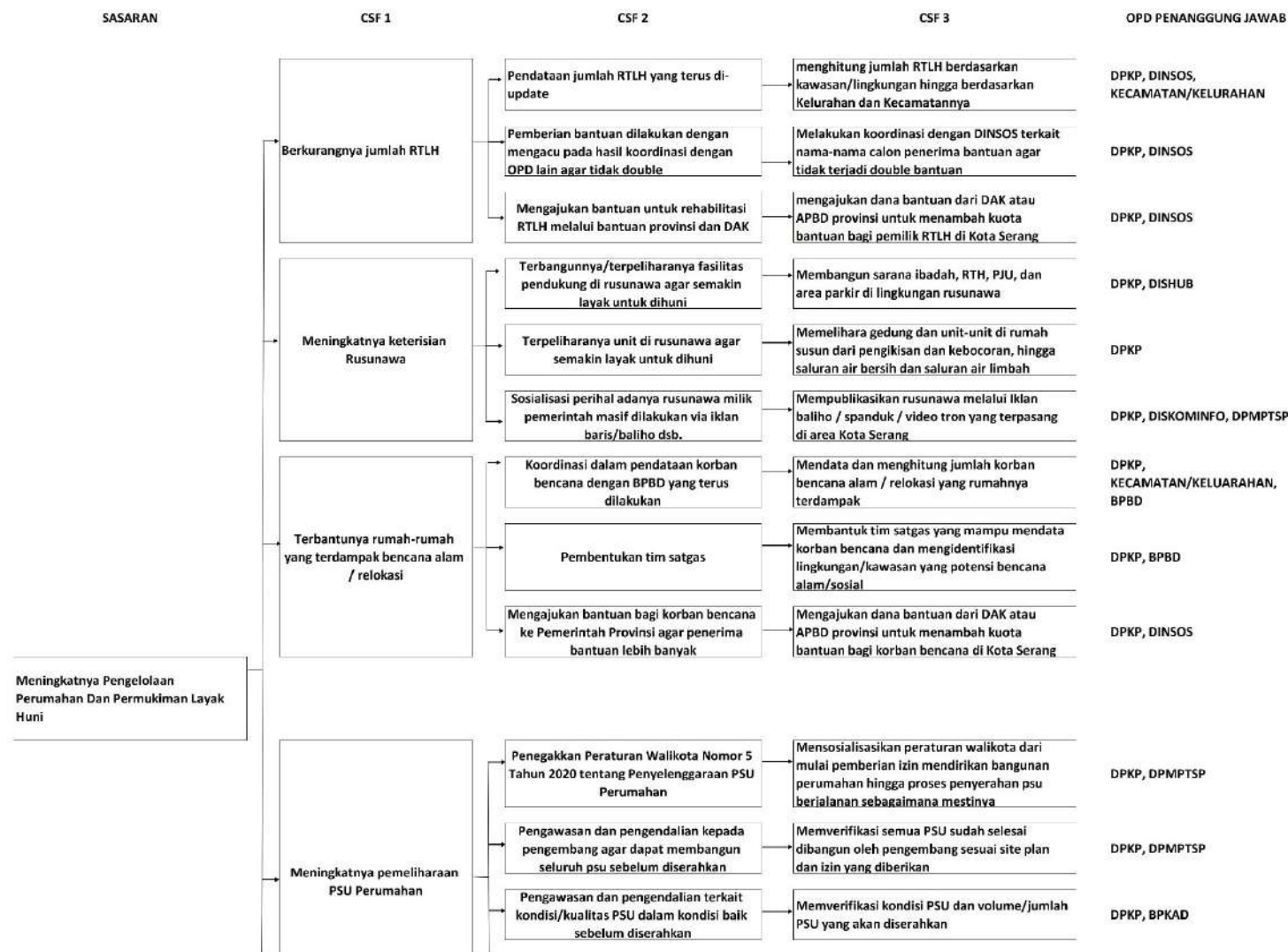
CASCADING URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

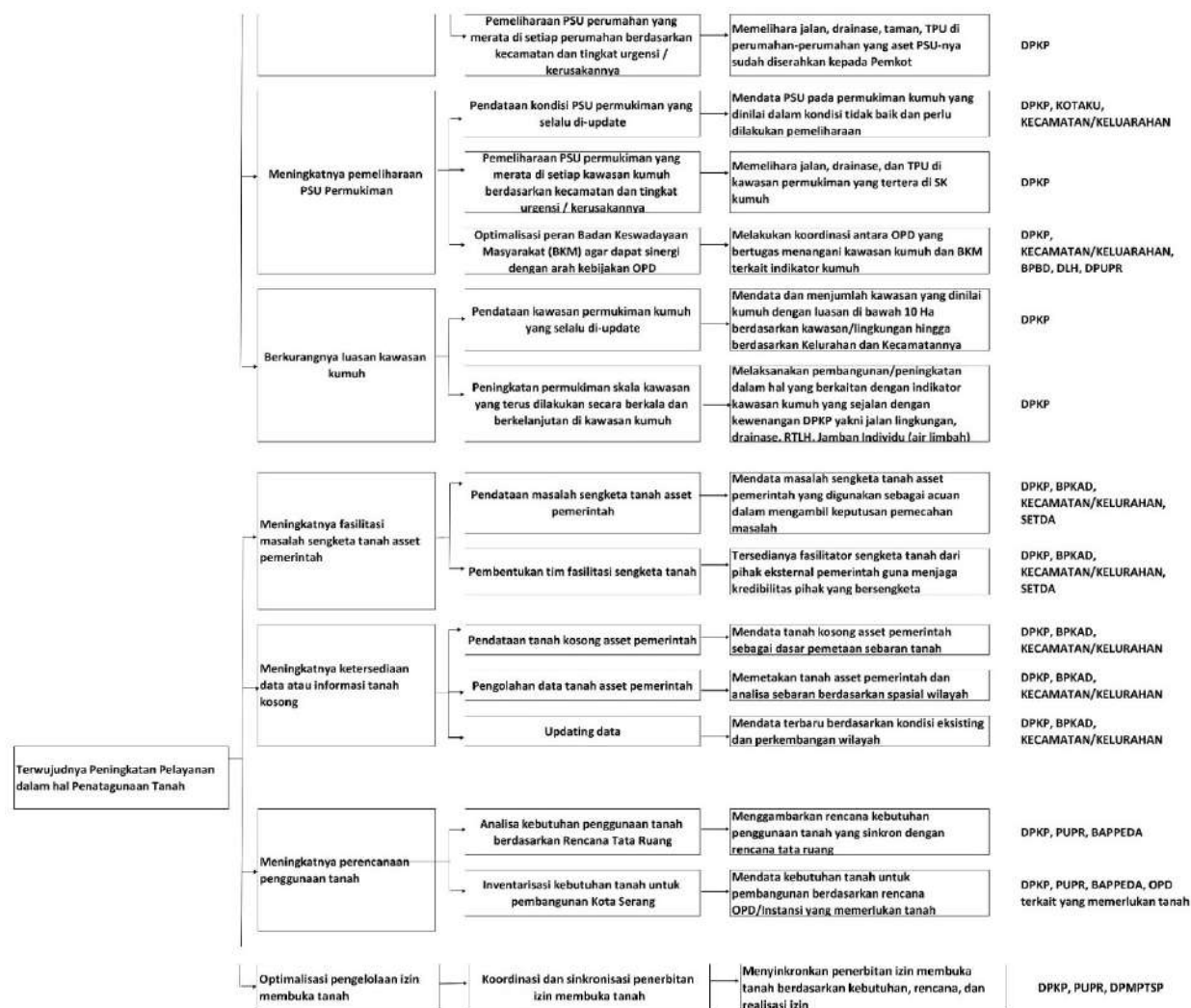


Serang, Agustus 2022
Kepala Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman

Nofriady Eka Putra, ST. MM. MH.
NIP. 19781123 200604 1 002

CROSS CUTTING URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis DPKP 2018 - 2023

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang nomor 113 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang bahwa DPKP memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman serta urusan bidang pertanahan. Berangkat dari hal tersebut, maka secara spesifik DPKP bertugas dalam pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Selain itu, DPKP juga melaksanakan pemberian bantuan baik untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni akibat bencana alam / relokasi, dan juga bantuan dalam bentuk PSU yakni jamban individu. Serta DPKP juga bertugas dalam bidang pertanahan yang meliputi pelaksanaan inventarisasi, perizinan, pemetaan tanah, dan juga penyelesaian sengketa tanah.

Secara singkat, rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang periode tahun 2018 – 2023:

Tabel 2.1 Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Periode 2018 - 2023

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR 2018	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									
							2019		2020		2021		2022		2023	
							Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								44.139.881.449		29.724.589.369		43.725.694.652		50.115.048.000		52.857.225.351

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TERWUJUDNYA KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TERTATA			PERSENTASE KAWASAN KUMUH	%	2,02	1,44		1,34		0,768		1,15		1,07	
				PRESENTASE LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERTATA	%	NA	98,87		99,19		96,57		99,38		99,45	
		MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK HUNI		RASIO RUMAH LAYAK HUNI	%	0,97	0,8670	44.139.881.449	0,8672	29.724.589.369	0,871	43.725.694.652	0,8679	50.115.048.000	0,868	
				CAKUPAN PERUMAHAN YANG DITANGANI OLEH PEMERINTAH DAERAH	%	16,69	24,62		28,72		34,16		32,84		35,23	
	MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN			CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00		100,00		100	
		TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DALAM HAL PENATAGUNAA N TANAH		CAPAIA N PENINGKATAN PENGUASAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFATAAN TANAH	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00		83,30		99,9	
URUSAN KESEKRETARIA TAN	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN			HASIL EVALUASI PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	%	100	100	6.120.165.740	100	7.134.340.117	100	6.533.602.117	100	7.613.287.000	100	8.627.851.351
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN LINGKUNG		CAPAIA N HASIL EVALUASI LKJIP PERANGKAT DAERAH												

		PERANGKAT DAERAH														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEKRETARIATAN	%	100	100	6.120.165.740	100	7.134.340.117	100	6.533.602.117	100	7.613.287.000	100	8.627.851.351
			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	100	100	282.170.000	100	719.368.000	100	442.036.550	100	485.780.273	100	534.331.300
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perubahan, Renja Dan Renja Perubahan	Dokumen	3	3	149.850.000	3	157.522.286	3	101.190.550	3	110.885.714	3	121.947.285
				Jumlah Dokumen PK & IKU	Dokumen	1	1		1		1		1		1	
				Jumlah Kegiatan Forum OPD	Kegiatan	1	1		1		1		1		1	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DOKumen										5	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	Dokumen	1	1	42.650.000	1	100.288.285,71	1	46.046.000	1	55.456.429	1	61.002.072
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen										1	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	1		1	55.983.285,71	1	43.323.000	1	48.233.214	1	53.056.535
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen										1	

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni	Dokumen	1	1		1	55.983.285,71	1	19.620.000	1	22.905.714	1	25.196.285
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen										1	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	1		1	55.983.285,71	1	21.960.000	1	28.588.738	1	31.447.612
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen										1	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Monev Triwulan	Dokumen	2	2	50.000.000	2	191.796.286	2	110.412.000	2	116.465.714	2	128.112.285
				Jumlah Dokumen Capaian Kinerja (LPPD, LKjIP, Ev Renja)	Dokumen	3	3		3		3		3		3	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan										2	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Profil Prangkat Daerah	Dokumen	0	0	39.670.000	1	101.811.285,71	1	99.485.000	1	103.244.750	1	113.569.225
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan										1	
			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD	Dokumen	13	13	3.326.577.703	13	3.131.502.272	13	4.079.425.490	13	4.815.207.000	13	5.256.090.351
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Gaji ASN	Orang	24	24	3.077.733.703	24	3.047.369.472	24	3.877.505.490	25	4.613.287.000	25	5.033.978.351
				Jumlah Bulan Gaji ASN	Bulan	14	14		14		14		14		14	

				Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan										350	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (Calk)	Dokumen	1	1	248.844.000	1	84.132.800	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan										1	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	12	12		12		12	101.920.000	12	101.920.000	12	112.112.000
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan										12	
			ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD	Dokumen	1	1	46.650.000	1	16.250.000	1	37.947.750	1	37.947.750	1	41.742.525
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD	Dokumen	1	1	46.650.000	1	16.250.000	1	37.947.750	1	37.947.750	1	41.742.525
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan										1	
			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD	%	0	0	0	0	0	100	-	100	35.000.000	100	167.500.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	N/A	N/A	0	N/A	0	30		30	35.000.000	30	167.500.000
				Jumlah Stel Pakaian Batik & Olahraga	Stel	N/A	N/A	0	N/A	0	60		60		60	

				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket										1	
			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSentase TINGKAT KETERSEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PD	%	100	100	905.761.253	100	1.162.320.102	100	669.979.208	100	705.272.000	100	806.799.200
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Listrik	Bulan	12	12	128.043.111	12	159.734.840	12	13.974.844	12	30.000.000	12	23.866.633
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket										1	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	12	12	128.043.111	12	159.734.840	12	124.551.176	12	150.000.000	12	197.956.637
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket										12	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Unit Peralatan Rumah Tangga	Unit	N/A	N/A	11.088.808	N/A	102.291.855	1659	35.788.336	1659	40.000.000	1660	22.833.860
				Jumlah Alat Kebersihan	Unit	N/A	N/A		N/A		1945		1945		1945	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket										12	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12	100.000.000	12	65.000.000	12	51.200.000	12	55.000.000	12	60.800.000
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket										12	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12	128.043.111	12	159.734.840	12	29.846.289	12	30.272.000	12	60.000.000
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket										12	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Surat Kabar	Bulan	12	12	128.043.111	12	159.734.840	12	113.067.363	12	120.000.000	12	110.000.000
				Jumlah Tayang Promosi Publikasi	Tayang	12	12		12		12		12		12	

				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen										12	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	12	12		12		12	29.995.500	12	30.000.000	12	30.000.000
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan										12	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bulan	12	12	282.500.000	12	356.088.887	12	271.555.700	12	250.000.000	12	238.159.200
				Jumlah Bulan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan	12	12		12		12		12		12	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan										12	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen										12	63.182.870
			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	%	100	100	299.397.829	100	746.730.545	100	85.800.000	100	230.000.000	100	379.000.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Roda Dua	Unit	0	0	0	0	0	1			-	1	35.000.000
				Jumlah Unit Cator (Roda Tiga)	Unit	0	0		0		2				2	
				Jumlah Unit Crane	Unit	0	0		0		1				1	
				Jumlah Unit Dum Truck	Unit	0	0		0		1				1	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit										1	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebeleur	Unit	40	45	110.888.085	45	460.313.349	45		45	50.000.000	45	55.000.000

				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit										45	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang disewa	Gedung	0	0	0	0	-	1	80.000.000	1	80.000.000	1	50.000.000
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit										1	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Kantor	Unit	20	25	188.509.744	25	286.417.195	28	5.800.000	28	100.000.000	30	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit										30	239.000.000
			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE CAKUPAN KETERSEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	100	100	789.515.455	100	841.374.199	100	702.474.019	100	766.000.000	100	855.600.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Lembar	N/A	12.804	128.043.111	15.973	159.734.840	900	9.000.000	1800	18.000.000	962	9.620.000
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan										12	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Telfon	Bulan	12	12	256.086.222	12	319.469.680	12	303.195.763	12	348.000.000	12	408.000.000
				Jumlah Bulan Pembayaran Listrik	Bulan	0	0		0		12		12		12	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan										12	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Event Pawai/Pameran	Event	3	3	405.386.122	3	362.169.680	3	390.278.256	3	400.000.000	3	437.980.000
				Jumlah Orang OP 112, Rabeg & Sistem lainnya	orang	0	0		3		3		3		3	
				Jumlah Orang Keamanan	Orang	30	30		30		30		30		30	
				Jumlah Orang Jasa Cleaning Service/Office Boy	Orang	20	20		20		20		20		20	

				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan										12	
			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE CAKUPAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	100	100	470.093.500	100	516.795.000	100	515.939.100	100	538.079.977	100	586.787.975
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Terpelihara	Unit	20	22	229.823.489	22	247.162.826	25	474.499.100	25	463.436.869	25	217.858.000
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit										5	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	28	28	240.270.011	30	269.632.174	30	41.440.000	45	74.643.108	25	-
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit										12	30.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit										30	56.000.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit										1	113.999.175
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit										20	168.930.800

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								38.019.715.709		22.590.249.252		35.191.103.535		40.900.261.000		42.558.777.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	CAKUPAN HUNIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG RUSUNAWA	%	-	-	13.530.390.016	-	926.276.695	75	1.616.483.825	62,50	2.857.000.000	72,92	3.200.000.000
				PRESENTASE RUMAH YANG DIPERBAIKI AKIBAT BENCANA	%	-	-		-		43,30		40,00		40	
			PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA ALAM	%	0	0	82.898.107	0	298.203.498	43,3	218.225.000	30	1.007.000.000	30	1.250.000.000
				PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA SOSIAL	%	0	0		0		0		50		50	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah yang direhab akibat Bencana Alam	Unit	0	0	16.918.107	0	298.203.498	13	218.225.000	30	507.000.000	30	650.000.000
				Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah											
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah yang direhab akibat Bencana Sosial	Unit	0	0	65.980.000	0	0	0	-	50	500.000.000	50	600.000.000
				Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit RUmah											
			PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	PRESENTASE PENGHUNI RUMAH SUSUN UMUM DAN ATAU RUMAH KHUSUS YANG TERBINA	%	0	0	13.447.491.909	0	628.073.198	10,71	1.398.258.825	100	1.850.000.000	100	1.950.000.000

				PRESENTASE TERSEDIAANYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR RUSUNAWA	%	0	0		0		100		100		100	
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik / Penghuni Rumah Susun	Jumlah RUSUNAWA yang dipelihara	Tower	0	1	5.715.743.800	1		1	835.600.653	1	1.200.000.000	3	1.250.000.000
				Pembangunan IPAL	Unit	0	0		0		0		1		0	
				Pembangunan Sarana Tempat Ibadah	Unit	0	0		0		0		1		0	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan									1		
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Bulan Pengadaaan ATK	Bulan	0	0	7.731.748.109	12	628.073.198	12	562.658.172	12	650.000.000	12	700.000.000
				Jumlah Penyediaan Alat Listrik	Bulan	0	0		12		12		12		12	
				Jumlah Materai	Lembar	0	0		500		4500		500		500	
				Jumlah Bulan Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Bulan	0	0		12		12		12		12	
				Jumlah Bulan Rapat rapat Koordinasi luar dalam	Bulan	0	0		12		12		12		12	
				Jumlah Peserta Sosialisasi Kepada Calon Penghuni Rusun	orang	0	0		60		30		60		60	
				Jumlah Tenaga Kebersihan	Orang	N/A	N/A		N/A		N/A		120		180	
				Jumlah Tenaga Pelayanan RUSUNAWA	Orang	N/A	N/A		N/A		N/A		48		72	
				Jumlah Tenaga Keamanan	Orang	N/A	N/A		N/A		N/A		120		120	
				Jumlah Bulan Pengadaan Alat Kebersihan	Bulan	N/A	N/A		N/A		N/A		12		12	
				Jumlah Perabot Kantor	Unit	N/A	N/A		N/A		0					
				Jumlah Pekerja Harian Lepas	orang	N/A	N/A		N/A		0					
				Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Dokumen											

				dan/atau Rumah Khusus												
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KAWASAN KUMUH	%	3,12	13,30	11.915.237.677	13,28	13.717.574.135	13,25	21.171.737.860	13,20	10.838.900.000	13,2	12.696.437.900
				PRESENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KONDISI BAIK	%	39,52	40,48		40,50		40,75		41,00		41,25	
				PRESENTASE PANJANG DRAINASSE LINGKUNGAN KONDISI BAIK	%	67,63	67,70		67,90		70,10		70,30		70,5	
			PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	JUMLAH DOKUMEN BASELINE KAWASAN KUMUH	Dokumen	1	1	1.791.117.770	1	335.240.500	1	4.101.651.500	1	650.000.000	1	747.500.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Penguatan BKM dan Fasilitator	BKM/Fasilitator	100	100	1.791.117.770	100	335.240.500,00	120	4.101.651.500	120	650.000.000	150	747.500.000
				Jumlah Laporan Rapat Koordinasi	NA	NA	NA		NA		NA		1		1	
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan										1	
			PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN KUMUH	%	0	100	10.124.119.907	100	13.382.333.635	100	17.070.086.360	100	10.188.900.000	100	11.948.937.900
				PRESENTASE UNIT REHABILITASI RTLH	%	0	0		0		100		100			
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Kumuh	Dokumen	1	1	456.534.128	1	666.380.050	1	783.550.000	1	1.034.916.000	1	1.190.153.400

				Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen										6	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Unit Rehabilitasi RTLH	Unit	0	0	0	0	-	12	256.228.498	100	2.462.024.000	100	1.500.000.000
				Jumlah RTLH yang Mendapatkan Bantuan Stimulan (Peningkatan Kualitas) (DAK FISIK)	Unit	N/A	N/A		N/A		42		N/A		N/A	
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah										75	
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah PSU RTLH yang ditangani	Unit	NA	NA	-	NA	-	0		900	2.034.320.000	900	4.000.000.000
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Baseline Kumuh	Dokumen	NA	NA	-	NA	-	0		6	225.030.000	1	258.784.500
				Jumlah Dokumen Pendataan RTLH	Dokumen	NA	NA		NA		0		1		6	
				Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen										0	
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pembangunan Kawasan Kumuh	Kawasan	0	3	9.667.585.779	2	12.715.953.585	1	16.030.307.862	1	4.432.610.000	1	5.000.000.000
				Pengadaan Tanah untuk Kawasan Kumuh	Kawasan	0	0		0		0		1		0	
				Jumlah Luasan Ha Kumuh yang ditangani	Ha	15.000	13300		N/A		1000		36,45		28,85	
				Jumlah RTLH yang Mendapatkan Bantuan Stimulan (Pembangunan Baru) (DAK FISIK)	Unit	NA	NA		NA		42		50		55	
				Jumlah Panjang Drainase Dan Tembok Penahan Tanah yang Tertangani di Lingkungan Permukiman												

				Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Permukiman yang terbangun												
				Jumlah Panjang Jalan Setapak Pembangunan Paving Block												
				Jumlah Panjang Jalan yang Terpelihara di Lingkungan Permukiman												
				Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha										0	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	10	12.061.361.000	12	10.303.562.100
			PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PSU DILUAR KAWASAN KUMUH YANG TERBANGUN	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	100	12.061.361.000	100	10.303.562.100
				PERSENTASE PENANGANAN RTLH DILUAR KAWASAN KUMUH	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-				
				Jumlah Pembangunan RTLH diluar Permukiman Kumuh (Pembangunan Baru)	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA		60		30	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Jumlah Rehabilitasi RTLH diluar Permukiman Kumuh (Peningkatan Kualitas)	Unit	NA	NA	NA	NA	NA	NA		60	1.532.550.000	30	
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah										100	1.000.000.000
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah PSU Permukiman Yang Terpelihara	Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA		50	10.528.811.000	50	9.303.562.100

			Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 Ha	Jumlah PSU Permukiman Yang Terbangun	Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA		10		10	
				Jumlah Sarana dan Prasarana TPU Permukiman (Pemagaran dll)	Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA		6		6	
				Jumlah Sarana dan Prasarana TPU yang dipelihara	Lokasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA		4		4	
				Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen											
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PRESENTASE PSU YANG DISERAHKAN	%	19,49	24,62	12.574.088.016	28,72	7.946.398.422	34,16	12.402.881.850	32,84	15.143.000.000	35,23	16.358.777.000
			URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	PRESENTASE PSU YANG TERBANGUN	%	100	100	12.574.088.016	100	7.946.398.422	100	12.402.881.850	100	15.143.000.000	100	16.358.777.000
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Taman (PSU) Perumahan	Dokumen	0	4	1.880.526.202	0	585.995.696	3	837.584.000	3	1.237.350.000	4	1.353.127.000
				Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Beton Lingkungan Perumahan	Dokumen	N/A	N/A		1		1		1		2	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan	Dokumen	2	2		6		2		3		4	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Embung Perumahan	Lokasi	NA	NA		2		0		3		4	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase Lingkungan Perumahan	Dokumen	2	2		3		2		2		4	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pemagaran Pemakaman	Dokumen	2	2		0		3		3		2	

				Dokumen PSU yang diserahkan	Dokumen	5	5		9		3		3		5	
				Jumlah Event Lingkungan Perumahan Sehat	Event	0	0		0		0		1		1	
				Jumlah Dokumen RP3KP	Dokumen	N/A	N/A		0		0		1		0	
				Jumlah Site Plan Perumahan yang di Keluarkan	Site plan	0	0		0		0		5		5	
				Dokumen PSU yang diserahkan	Dokumen						3					
				Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen										18	
				Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang terbangun	m2	N/A	N/A		13000	7.149.548.097	43600		61500		67000	
				Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara di Lingkungan Perumahan	m2	N/A	N/A		10000		22000		27600		32000	
				Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan di Lingkungan Perumahan	m2	N/A	N/A		3000		21600		33900		35000	
				Jumlah Lokasi Drainase Lingkungan Perumahan yang terbangun	Lokasi	N/A	N/A		5		1		5		5	
				Jumlah Lokasi Drainase yang dipelihara di Lingkungan Perumahan	Lokasi	N/A	N/A	10.172.607.654	23		48	11.371.400.040	54	13.705.650.000	48	14.705.650.000
				Jumlah Taman (PSU) Perumahan yang terbangun	Lokasi	N/A	N/A		2		0		3		3	
				Jumlah Taman (PSU) Perumahan yang dipelihara	Lokasi	N/A	N/A		47		56		62		67	
				Jumlah Sarana dan Prasarana TPU yang dibangun	Lokasi	N/A	N/A		4		6		7		8	
				Jumlah Sarana dan Prasarana TPU yang dipelihara	Lokasi	25	28		28		0		34		40	
				Jumlah Embung terbangun	Lokasi	2	2		0		0		0		1	

				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi										25	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Perumahan	Orang	50	50	520.954.159	50	210.854.629	50	193.897.810	100	200.000.000	100	300.000.000
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan	Orang	100	100		50		100		100			
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan										1	
								-		-		1.835.519.000		1.601.500.000		1.670.597.000
			PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENGKETA GARAPAN	PRESENTASE FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA TANAH	%	NA	NA	NA	NA	NA	0	48.675.000	100	181.500.000	100	216.199.000
			PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAPORAN SENGKETA, KONFLIK & PERKARA YANG TERFASILITASI	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	0	48.675.000	2	181.500.000	2	216.199.000
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Identifikasi dan Investigasi	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	2	48.675.000	2	181.500.000	2	216.199.000
				Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	1		1			
				Sosialisasi Penanganan Masalah Pertanahan	Kecamatan	NA	NA	NA	NA	NA	2		2			
				Jumlah data Sengketa, Konflik, dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen										1	
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1	Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	NA	NA		NA		0		2		2	
				Hasil fasilitasi sengketa, konflik	Dokumen	NA	NA		NA		0		2		2	

			(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara											
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PRESENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN TANAH KOSONG	%	NA	NA	NA	NA	NA	33,3	101.042.000	66,6	165.000.000	100	182.349.500
			INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	KETERSEDIAAN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	2	101.042.000	1	165.000.000	1	182.349.500
			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Sosialisasi	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	90	101.042.000	3	165.000.000	3	182.349.500
				Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	2		4			
				Data Tanah Kosong Yang Belum Dimanfaatkan	Kecamatan	NA	NA	NA	NA	NA	1		4			
				Data Tanah Kosong Yang Sudah Dimanfaatkan	Unit/Software	NA	NA	NA	NA	NA	1					
				Jumlah Wilayah Yang Sudah Terinventarisir							2					
				Jumlah laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Dokumen										3	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PRESENTASE PENINGKATAN PENGGUNAAN TANAH NEGARA	%	NA	NA	NA	NA	NA	100	1.685.802.000	100	805.000.000	100	822.349.500
			PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN DOKUMENTASI PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	11	1.685.802.000	2	805.000.000	3	822.349.500
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	0		2	200.000.000	3	208.674.750
				Sosialisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	N/A	NA	NA		NA		0		250		3	
				Dokumen Kebijakan Perencanaan	N/A	NA	NA		NA		0		1		3	

				Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	N/A	NA	NA		NA		0		1		3	
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	laporan										3	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	1	1.685.802.000	0	605.000.000	0	613.674.750
				Dokumen Perundang- Undangan Pertanahan	Buku	NA	NA	NA	NA	NA	112		0		0	
				Penyusunan Kajian Konsolidasi Pertanahan	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	1		0		0	
				Lokasi Pembebasan Tanah	Lokasi	NA	NA		NA		0		0		0	
				Dokumen Perencanaan	Dokumen	NA	NA		NA		0		0		0	
				Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan koordinasi konsolidasi tanah kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen											
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN TANAH NEGARA YANG DIMANFAAATKAN	%	NA	NA	NA	NA	NA	-	-	100	450.000.000	100	449.699.000
			PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI IZIN MEMBUKA TANAH	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	NA	-	1	450.000.000	3	449.699.000
			Koordinasi dan Singkronasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	0		4	200.000.000	4	182.349.500
				Sosialisasi Penetapan Lokasi/Izin Membuka Tanah Negara	Orang	NA	NA		NA		0		100		100	
				Jumlah dokumen izin membuka tanah dan penetapan lokasi	Dokumen	NA	NA		NA		0		1		3	

				Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemberian izin membuka tanah	Dokumen										1	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah Negara	Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	NA	NA	NA	NA	NA	0		4	250.000.000	6	267.349.500
				Monitoring Izin Membuka Tanah Negara/Penetapan Lokasi	Dokumen	NA	NA		NA		0		6		6	
				Dokumen Kebijakan Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	NA	NA		NA		0		1			
				Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	Dokumen										1	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	5.354.014.975	N/A	7.921.182.798		165.470.000				
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	REALISASI RUANG TERBUKA HIJAU YANG TERPELIHARA	%	1,5	9,63	5.354.014.975	9,64	7.921.182.798		165.470.000				
			PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	LUASAN RTH YANG TERPELIHARA	Ha	158,9	158,9	5.354.014.975	N/A	7.921.182.798		165.470.000				
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Unit RTH yang Terbangun (BANPROV)	Unit							165.470.000				
				Jumlah Unit RTH yang Terbangun	Unit	0	1	5.354.014.975		7.921.182.798						
				Jumlah Unit RTH yang Terpelihara	Unit	33	35									
				JUMLAH DED RTH	Dokumen	2	0									
				Pengadaan Tanah untuk RTH	Unit											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								7.478.328.629		1.407.702.000						

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	CAKUPAN LAYANAN AIR BERSIH	%	37,52	38,9 5	4.488.354.120	56,1 4	577.059.700						
			PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN AIR BERSIH	%	100	100	4.488.354.120		577.059.700						
				JUMLAH KK YANG MENERIMA PENYALURAN AIR BERSIH	KK	50	85									
		8	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Perencanaan Air Bersih	Dokumen	3	3	692.578.195	3	327.661.408						
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kran Umum Terbangun	Unit	3	2	3.795.775.925		249.398.292						
				Jumlah sumur Artesis yang Terbangun	Unit											
				Jumlah Jaringan Perpipaan Air Bersih	Unit		2									
				Perluasan SPAM Perpipaan (DAK FISIK)	Unit	0	2									
				Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan (DAK FISIK)	Unit	0	2									
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PRESENTASE RUMAH TANGGA BERSANITASI	%	72,6	79,2 7	2.989.974.510	69,3 3	830.642.300						
			PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN SANITASI	%	100	100	2.989.974.510	100	830.642.300						
				JUMLAH KK YANG TERFASILITASI SANITASI DASAR	KK	0	100									
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Sanitasi Dasar	Dokumen	4	3	766.694.336		329.320.339						
			Pembangunan/Penye- diaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Jamban Individu terbangun	Unit			2.223.280.173		501.321.961						
				Jumlah IPAL Komunal terbangun	Unit											

				Jumlah MCK terbangun	Unit		2									
				Pembangunan IPAL Komunal (DAK FISIK)	Unit	0	4									
TOTAL PENDANAAN OPD DINAS PERUMAHAN RAYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								44.139.881.449		29.724.589.369		43.725.694.652		50.115.048.000		52.857.225.351

2.2 Rencana Kerja Tahun 2022

Seluruh perencanaan yang tertuang pada dokumen rencana strategis di atas selanjutnya akan dijabarkan menjadi rencana tahunan yang biasa disebut dengan rencana kerja (Renja). Rencana kerja berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun berkenaan, pada dokumen rencana kerja pun tertuang rencana anggaran yang diperlukan yang berbanding lurus dengan target-target yang ditetapkan. Berikut rencana kerja Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:

Tabel 2.2 Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN KINERJA	Rencana Tahun 2022			
			INDIKATOR SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		Lokasi	Target	Kebutuhan Pagu (Rp)	Sumber Dana
				SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									50.115.048.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	MENGURANGI KAWASAN KUMUH DAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DENGAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI.		PERSENTASE KAWASAN KUMUH			%		1,15		
			PRESENTASE LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG TERTATA			%		99,38		
		MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERUMAHAN DAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI			%		86,79		

		PERMUKIMAN LAYAK HUNI	CAKUPAN PERUMAHAN YANG DITANGANI OLEH PEMERINTAH DAERAH			%		32,84		
	MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN		CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN			%		100,00		
		TERWUJUDNYA PENINGKATAN PELAYANAN DALAM HAL PENATAGUNAA N TANAH	CAPAIA N PENINGKATAN PENGUASAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFATAAN TANAH			%		83,30		
URUSAN KESEKRETARIAT AN			MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARA AN PEMERINTAH PADA LINGKUP PERANGKAT DAERAH		CAPAIA N HASIL EVALUASI LKJIP PERANGKAT DAERAH	%	#N/A			

		URUSAN KESEKRETARIAT AN							7.613.287.000	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KESEKRETARIATA N	%	-	100	7.613.287.000	
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	-	100	485.780.273	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perubahan, Renja Dan Renja Perubahan	Dokumen	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	3	110.885.714	
					Jumlah Dokumen PK & IKU	Dokumen		1		
					Jumlah Kegiatan Forum OPD	Kegiatan		1		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	Dokumen	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	1	55.456.429	

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	1	48.233.214	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni	Dokumen	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	1	22.905.714	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	1	28.588.738	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Monev Triwulan	Dokumen	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	2	116.465.714	APBD
					Jumlah Dokumen Capaian Kinerja (LPPD, LKjIP, Ev Renja)	Dokumen		3		APBD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Profil Prangkat Daerah	Dokumen	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	1	103.244.750	

				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KETERSEDIAAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN PD	Dokumen	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	13	4.815.207.000	APBD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Gaji ASN	Orang	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	25	4.613.287.000	APBD
					Jumlah Bulan Gaji ASN	Bulan		14		APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (Calk)	Dokumen	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	1	100.000.000	APBD
				Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	12	101.920.000	APBD
				ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN ADMINISTRASI BMD PADA PD	Dokumen	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	1	37.947.750	APBD

				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen BMD	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	37.947.750	APBD
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE KETERSEDIAAN PENUNJANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PD	%	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	35.000.000	APBD
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	30	35.000.000	APBD
					Jumlah Stel Pakaian Batik & Olahraga	Stel	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	60		APBD
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PD	%	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	100	635.272.000	APBD

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Listrik	Bulan	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	12	30.000.000	APBD
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bulan	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	12	150.000.000	APBD
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Unit Peralatan Rumah Tangga	Unit	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	1659	40.000.000	APBD
					Jumlah Alat Kebersihan	Unit		1945		APBD
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	12	55.000.000	APBD
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	12	30.272.000	APBD

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Surat Kabar	Bulan	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	12	100.000.000	APBD
					Jumlah Tayang Promosi Publikasi	Tayang		12		APBD
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	12	30.000.000	APBD
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bulan	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	12	200.000.000	APBD
					Jumlah Bulan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan		12		APBD
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE TINGKAT KETERSEDIAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	%	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	100	230.000.000	APBD
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Roda Dua	Unit	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung		-	APBD
					Jumlah Unit Cator (Roda Tiga)	Unit				APBD

					Jumlah Unit Crane	Unit				APBD
					Jumlah Unit Dum Truck	Unit				APBD
				Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebeleur	Unit	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	45	50.000.000	APBD
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang disewa	Gedung	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	1	80.000.000	APBD
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Kantor	Unit	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	28	100.000.000	APBD

				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE CAKUPAN KETERSEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	100	777.000.000	APBD
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	Lembar	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	5000	9.000.000	APBD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Telfon	Bulan	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	12	348.000.000	APBD
					Jumlah Bulan Pembayaran Listrik	Bulan		12		APBD
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Event Pawai/Pameran	Event	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	3	420.000.000	APBD
					Jumlah Orang OP 112, Rabeg & Sistem lainnya	orang		3		APBD
					Jumlah Orang Keamanan	Orang		30		APBD
					Jumlah Orang Jasa Cleaning Service/Office Boy	Orang		20		APBD

				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE CAKUPAN PEMELIHARAAN BMD PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	100	597.079.977	APBD
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Terpelihara	Unit	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	25	550.000.000	APBD
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	45	47.079.977	APBD
		URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							40.900.261.000	

				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	CAKUPAN HUNIAN TERHADAP DAYA TAMPUNG RUSUNAWA	%	Kota Serang, Cipocok Jaya, Banjar Agung	62,50	2.857.000.000	APBD
					PRESENTASE RUMAH YANG DIPERBAIKI AKIBAT BENCANA	%	Semua Kabupaten/ K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,00		APBD
				PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA ALAM	%	Semua Kabupaten/ K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	1.007.000.000	APBD
					PRESENTASE RUMAH YANG DI REHAB AKIBAT BENCANA SOSIAL	%	Semua Kabupaten/ K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50		APBD
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah yang direhab akibat Bencana Alam	Unit	Semua Kabupaten/ K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30	507.000.000	APBD

				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang direhab akibat Bencana Sosial	Unit	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50	500.000.000	APBD
				PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	PRESENTASE PENGHUNI RUMAH SUSUN UMUM DAN ATAU RUMAH KHUSUS YANG TERBINA	%	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1.850.000.000	APBD
					PRESENTASE TERSEDIAANYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR RUSUNAWA	%	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100		APBD
				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah RUSUNAWA yang dipelihara	Tower	Kota Serang, Serang, Serang	1	1.200.000.000	APBD
				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Bulan Pengadaan ATK	Bulan	Kota Serang, Serang, Serang	12	650.000.000	APBD
					Jumlah Penyediaan Alat Listrik	Bulan	Kota Serang, Serang, Serang	12		APBD
					Jumlah Materai	Lembar	Kota Serang, Serang, Serang	500		APBD

					Jumlah Bulan Penyediaan Cetak dan Penggandaan	Bulan	Kota Serang, Serang, Serang	12		APBD
					Jumlah Bulan Rapat rapat Koordinasi luar dalam	Bulan	Kota Serang, Serang, Serang	12		APBD
					Jumlah Peserta Sosialisasi Kepada Calon Penghuni Rusun	orang	Kota Serang, Serang, Serang	60		APBD
					Jumlah Tenaga Kebersihan	Orang	Kota Serang, Serang, Serang	120		APBD
					Jumlah Tenaga Pelayanan RUSUNAWA	Orang	Kota Serang, Serang, Serang	48		APBD
					Jumlah Tenaga Keamanan	Orang	Kota Serang, Serang, Serang	120		APBD
					Jumlah Bulan Pengadaan Alat Kebersihan	Bulan	Kota Serang, Serang, Serang	12		APBD
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PRESENTASE PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	%	Kota Serang, Serang, Serang	13,20	10.838.900.000	APBD

					PRESENTASE PANJANG JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KONDISI BAIK	%	Kota Serang, Serang, Serang	41,00		APBD
					PRESENTASE PANJANG DRAINASSE LINGKUNGAN KONDISI BAIK	%	Kota Serang, Serang, Serang	70,30		APBD
				PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	JUMLAH DOKUMEN BASELINE KAWASAN KUMUH	Dokumen	Kota Serang, Serang, Serang	1	650.000.000	APBD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Penguatan BKM dan Fasilitator	BKM/Fasilitator	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120	650.000.000	APBD

					Jumlah Laporan Rapat Koordinasi	NA	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1		APBD
				PENINGKATAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	PRESENTASE DOKUMEN PERENCANAAN KUMUH	%	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	10.188.900.000	APBD
					PRESENTASE UNIT REHABILITASI RTLH	%	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100		APBD
				Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Perencanaan Kumuh	Dokumen	Kel. Bendung, Kiara, Pabuaran, Banjar Sari, Dalung, Curug	1	1.034.916.000	APBD
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Unit Rehabilitasi RTLH	Unit	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	2.462.024.000	APBD
					Jumlah RTLH yang Mendapatkan Bantuan Stimulan (Peningkatan Kualitas) (DAK FISIK)	Unit	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			APBN

				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah PSU RTLH yang ditangani	Unit	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900	2.034.320.000	APBD
				Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Baseline Kumuh	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	225.030.000	APBD
					Jumlah Dokumen Pendataan RTLH	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1		APBD
				Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pembangunan Kawasan Kumuh	Kawasan	Kel Sumur Pecung, Kasunyatan, Mesjid Priyai, Cigoong, Banjar Agung, Kemanisan	1	4.432.610.000	APBD
					Pengadaan Tanah untuk Kawasan Kumuh	Kawasan	Kel Sumur Pecung, Kasunyatan, Mesjid Priyai, Cigoong, Banjar Agung, Kemanisan	1		APBD

					Jumlah Luasan Ha Kumuh yang ditangani	Ha	Kel Sumur Pecung, Kasunyatan, Mesjid Priyai, Cigoong, Banjar Agung, Kemanisan	36,45		APBD
					Jumlah RTLH yang Mendapatkan Bantuan Stimulan (Pembangunan Baru) (DAK FISIK)	Unit	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50		APBN
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PENANGANAN RTLH DILUAR KAWASAN KUMUH	%	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10	12.061.361.000	APBD
					PERSENTASE PENANGANAN PSU DI LUAR KAWASAN KUMUH	%	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10		APBD
				PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PSU DILUAR KAWASAN KUMUH YANG TERBANGUN	%	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12.061.361.000	APBD

				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Jumlah Pembangunan RTLH diluar Permukiman Kumuh (Pembangunan Baru)	Unit	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60	1.532.550.000	APBD
					Jumlah Rehabilitasi RTLH diluar Permukiman Kumuh (Peningkatan Kualitas)	Unit	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60		APBD
				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 Ha	Jumlah PSU Permukiman Yang Terpelihara	Lokasi	Kelurahan Curug, Kel. Pancur, Kel. Kasunyatan, Kel. Terondol	50	10.528.811.000	APBD
					Jumlah PSU Permukiman Yang Terbangun	Lokasi	Kel. Kalodran, Kel. Mesjid Priyayi, Kel. Kasemen, Kel. Cipare, Kel. Banjar Agung	10		APBD
					Jumlah Sarana dan Prasarana TPU Permukiman (Pemagaran dll)	Lokasi	TPU Baitul Shodikin Kel. Pager Agung, TPU Kel. Sepang, TPU Kel.	6		APBD

							Cilowong, TPU Cibendung Taktakan, TPU Taman Baru Taktakan, TPU Banjar Agung			
					Jumlah Sarana dan Prasarana TPU yang dipelihara	Lokasi	TPU Lopang Gede, TPU Kp. Kepuren, TPU Kp. Balai Batu Kel. Lialang, TPUKarang Asem Kel. Pancur	4		APBD
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PRESENTASE PSU YANG DISERAHKAN	%	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,84	15.143.000.000	APBD
				URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	PRESENTASE PSU YANG TERBANGUN	%	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	15.143.000.000	APBD

				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Taman (PSU) Perumahan	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	1.237.350.000	APBD
					Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Beton Lingkungan Perumahan	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1		APBD
					Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3		APBD
					Jumlah Dokumen Perencanaan Embung Perumahan	Lokasi	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3		APBD
					Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase Lingkungan Perumahan	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2		APBD

					Jumlah Dokumen Perencanaan Pemagaran Pemakaman	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3		APBD
					Dokumen PSU yang diserahkan	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3		APBD
					Jumlah Event Lingkungan Perumahan Sehat	Event	Perumahan yang sudah menyerahkan PSU ke Pemkot Serang	1		APBD
					Jumlah Dokumen RP3KP	Dokumen	Perumahan yang sudah menyerahkan PSU ke Pemkot Serang	1		APBD
					Jumlah Site Plan Perumahan yang di Keluarkan	Site plan	Perumahan yang sudah menyerahkan PSU ke Pemkot Serang	5		APBD
				Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang terbangun	m2	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61500	13.705.650.000	APBD

					Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara di Lingkungan Perumahan	m2	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27600		APBD
					Jumlah Panjang Jalan yang ditingkatkan di Lingkungan Perumahan	m2	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33900		APBD
					Jumlah Lokasi Drainase Lingkungan Perumahan yang terbangun	Lokasi	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5		APBD
					Jumlah Lokasi Drainase yang dipelihara di Lingkungan Perumahan	Lokasi	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54		APBD
					Jumlah Taman (PSU) Perumahan yang terbangun	Lokasi	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3		APBD
					Jumlah Taman (PSU) Perumahan yang dipelihara	Lokasi	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62		APBD

					Jumlah Sarana dan Prasarana TPU yang dibangun	Lokasi	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7		APBD
					Jumlah Sarana dan Prasarana TPU yang dipelihara	Lokasi	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34		APBD
					Jumlah Embung terbangun	Lokasi	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0		APBD
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Perumahan	Orang	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	200.000.000	APBD
					Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan	Orang	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100		APBD

		URUSAN PERTANAHAN							1.601.500.000	
				PROGRAM PENYELESAIAN TANAH SENGKETA GARAPAN	PRESENTASE FASILITASI KONFLIK SENGKETA TANAH	%	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	181.500.000	APBD
				PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LAPORAN SENGKETA YANG TERFASILITASI	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	181.500.000	APBD
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Identifikasi dan Investigasi	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	181.500.000	APBD
					Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1		APBD
					Sosialisasi Penanganan Masalah Pertanahan	Kecamatan	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2		APBD

				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	PENINGKATAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	%	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,3	165.000.000	APBD
				INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	KETERSEDIAAN DATA/INFORMASI PEMANFAATAN TANAH KOSONG	Dokumen	Kota Serang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	165.000.000	APBD
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Sosialisasi	orang	Semua Kabupaten/ K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120	165.000.000	APBD
					Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	Semua Kabupaten/ K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2		APBD
					Data Tanah Kosong Yang Belum Dimanfaatkan	Dokumen	Semua Kabupaten/ K ota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1		APBD

					Data Tanah Kosong Yang Sudah Dimanfaatkan	Dokumen	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1		APBD
					Jumlah Wilayah Yang Sudah Terinventarisir	Kecamatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2		APBD
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PANDUAN KEBIJAKAN PENATAGUNAAN PERTANAHAN	Dokumen	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	805.000.000	APBD
				PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN DOKUMENTASI PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dokumen	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	805.000.000	APBD

				Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.000.000	APBD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Dokumen	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	605.000.000	APBD
					Dokumen Perundang-Undangan Pertanahan	Buku	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-		APBD
					Penyusunan Kajian Kondolidasi Pertanahan	Dokumen	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-		APBD
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	%	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	450.000.000	APBD

				PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	Inventarisasi Data/Informasi Izin Membuka Tanah	Dokumen	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	450.000.000	APBD
				Koordinasi dan Sinkronasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Sosialisasi	Kecamatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	200.000.000	APBD
				Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah Negara	Monitoring	Kecamatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2	250.000.000	APBD
TOTAL PENDANAAN OPD DINAS PERUMAHAN RAYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									50.115.048.000	

Setelah penyusunan rencana kerja tahunan yang disadur dari dokumen rencana strategis lima tahunan, dalam suatu Tahun berjalan OPD akan mulai Menyusun rencana kinerja anggaran (RKA) yang berisi nilai-nilai belanja yang akan direalisasikan pada Tahun selanjutnya. Proses penyusunan rencana kinerja anggaran ini pun melalui beberapa proses asistensi untuk mengukur apakah nilai dari suatu belanja terlalu besar/kecil, sehingga tujuannya adalah untuk meminimalisir belanja yang dirasa berlebihan atau bukan prioritas.

2.3 Indikator Kerja Utama

Berikut Indikator Kerja Utama DPKP Tahun 2022:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama DPKP Kota Serang

No	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formulasi Pengukuran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan Dan Permukiman Tertata	Persentase Kawasan Kumuh	%	1,15	<i>Luas Kawasan Kumuh Daerah Kabupaten/Kota / Luas Wilayah Daerah Kabupaten/Kota * 100%</i>	Bidang Kawasan Permukiman
		Presentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata	%	99,38	<i>Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah seluruh Rumah Tinggal</i>	Bidang Kawasan Permukiman
2	Meningkatnya Pengelolaan Perumahan Dan Permukiman Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,8679	<i>Jumlah Luasan Permukiman yang tertata / Jumlah Luas Permukiman * 100%</i>	Bidang Kawasan Permukiman
		Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah	%	32,84	<i>Jumlah Pengembang yang sudah Menyerahkan Asetnya / Jumlah Pengembang yang ada di Kabupaten/Kota * 100 %</i>	Bidang Perumahan
3	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan	Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	%	100	<i>Jumlah Realisasi Pelayanan Pertanahan / Jumlah Target Layanan Pertanahan * 100%</i>	Bidang Pertanahan
4	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah	Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah	%	83,3	<i>Jumlah Realisasi Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah / Jumlah Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah * 100%</i>	Bidang Pertanahan

Berdasarkan tabel 2.3 di atas diperoleh bahwa yang menjadi sasaran dalam setiap kinerja DPKP dari tahun ke tahun adalah menekan angka Kawasan kumuh, jumlah atau rasio rumah layak huni, jumlah perumahan yang menyerahkan aset PSU nya kepada pemerintah, dan pelayanan administrasi di bidang pertanahan.

Semua sasaran tersebut tentunya ditunjang dengan semua program atau kegiatan yang dijalankan oleh DPKP setiap tahunnya. Sehingga diharapkan di tahun 2023 di mana pada tahun tersebut merupakan akhir periode Renstra DPKP hal-hal yang menjadi target DPKP akan tercapai.

2.4 Perjanjian Kinerja DPKP Tahun 2022

Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*performance agreement*). Penetapan kinerja juga merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran (*budgeting process*). Aktualisasi kinerja sebagai realisasi penetapan kinerja dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun target perjanjian kinerja/ penetapan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Pengelolaan Perumahan Dan Permukiman Layak Huni	Rasio Permukiman Layak Huni	0,8679
		Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah	32,84%
2	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah	Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah	83,30%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	100%	7.963.467.898	
2	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung Rusunawa	62,5	1.346.170.000	
		Presentase Rumah Yang Diperbaiki Akibat Bencana	40		

3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Di Kawasan Kumuh	13,20%	13.789.029.583	
		Presentase Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Kondisi Baik	41%		
		Presentase Panjang Drainasse Lingkungan Kondisi Baik	70,30%		
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rtlh Di Luar Kawasan Kumuh	10%	11.207.825.810	
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Presentase Psu Yang Diserahkan	32,84%	32.855.865.758	
6	Program Penatagunaan Tanah	Presentase Peningkatan Penggunaan Tanah Negara	100%	918.250.000	
7	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Presentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong	66,60%	457.143.000	
8	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Pengelolaan Tanah Negara Yang Dimanfaatkan	100%	336.204.000	
9	Program Penyelesaian Tanah Sengketa Garapan	Presentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah	100%	187.831.000	
Jumlah Anggaran				69.061.787.049	

2.5 Rencana Aksi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja DPKP Tahun 2022

Berikut rencana aksi DPKP Tahun 2022:

Tabel 2.5 Rencana Aksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan dan Sasaran Strategis OPD	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Rencana Aksi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Rencana Pelaksanaan												Ket
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan / Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkung Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Kesekretariatan	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan	Koordinasi baik internal di OPD, maupun secara eksternal dengan OPD-OPD koordinator seperti BAPPEDA, Sekretariat Daerah, BPKAD, Inspektorat, ataupun stakeholder lainnya	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	526.956.595													
			Tersusunnya dokumen administrasi keuangan dan penggajian ASN	Koordinasi baik secara internal di OPD maupun dengan BPKAD, dan BKPSDM	Jumlah Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Pd	Dokumen	13	4.770.248.451													
			Tersusunnya dokumen administrasi penatausahaan barang milik daerah	Koordinasi baik secara internal di OPD maupun dengan BPKAD	Jumlah Dokumen Administrasi Bmd Pada Pd	Dokumen	1	42.750.550													
			Tersedianya PDH dan PDL bagi seluruh pegawai	Koodinasi secara internal	Persentase Ketersediaan Penunjang Administrasi Kepegawaian Pd	%	100	36.010.000													
			Tersedianya seluruh sarana penunjang operasional PD	Koordinasi baik secara internal maupun dengan pihak eksternal yang berkaitan	Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum Pd	%	100	693.166.781													
			Terpeliharanya prasarana dan sarana penunjang operasional maupun kinerja PD	Koordinasi baik secara internal maupun	Persentase Cakupan Pemeliharaan	%	100	460.948.800													

				masyarakat, BPN, bidang aset BPKAD dan Sekretariat Daerah																
		Meningkatnya fasilitasi masalah sengketa tanah aset pemerintah	Terfasilitasinya masalah sengketa tanah aset pemerintah	Koordinasi secara internal, dan eksternal melalui rapat dengan masyarakat, BPN, bidang aset BPKAD dan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Sengketa, Konflik & Perkara Yang Terfasilitasi	Dokumen	2	187.831.000												
								69.061.787.049												

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Selain itu, pengukuran kinerja juga merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai suatu tatanan, instrument, dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja secara khusus membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan tingkat kinerja standar, rencana, atau target.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama guna mengetahui sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang dalam kurun waktu Januari-Desember 2022. Proses tersebut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tahap pengukuran kinerja ini tidak boleh menetapkan atau merubah indikator kinerja kegiatan dan satuan indikator kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan didalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi, dan kualitas pencapaian sasaran, dilakukan pengumpulan data kinerja atau indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil yang dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun. Dalam beberapa aspek pekerjaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui bidang Kawasan permukiman seringkali bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam hal penataan dan peningkatan Kawasan kumuh, seperti Pemerintah Provinsi Banten baik dengan cara pengajuan bantuan Keuangan maupun permohonan agar Pemprov melakukan pembangunan langsung di wilayah kota Serang. Pihak lain yang sering berkoordinasi dengan DPKP adalah Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR melalui program KOTAKU. DPKP dan KOTAKU seringkali bersinergi dengan cara koordinasi, sosialisai maupun *sharing* data di lapangan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan diharapkan pembangunan dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

Pada tabel 3.1 di bawah disajikan perbandingan antara apa yang sudah ditargetkan dan hasil capaian selama periode Tahun 2022.

Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terwujudnya Kawasan Perumahan Dan Permukiman Tertata			Persentase Kawasan Kumuh	%	1,15	0,56441695	203,750083	Sangat Tinggi
				Presentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata	%	99,38	96,5716208	97,17410026	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Pengelolaan Perumahan Dan Permukiman Layak Huni		Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,8675	0,87435241	100,789903	Sangat Tinggi
				Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah	%	32,84	40,2843602	122,6685755	Sangat Tinggi
			Terbantunya rumah-rumah yang terdampak bencana alam dan/atau sosial	Presentase Rumah Yang Diperbaiki Akibat Bencana	%	40,00	117,11	292,78	Sangat Tinggi
			Terlaksananya rehabilitasi rumah korban bencana	Presentase Rumah Yang Di Rehab Akibat Bencana Alam	%	30,00	117,11	390,37	Sangat Tinggi
				Presentase Rumah Yang Di Rehab Akibat Bencana Sosial	%	50,00	0,00	0,00	Sangat Rendah
			Meningkatnya keterisian Rusunawa	Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung Rusunawa	%	62,50	64,58	103,33	Sangat Tinggi
				Presentase Penghuni Rumah Susun Umum Dan	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

			Terbangunnya/terpeliharanya fasilitas pendukung di rusunawa agar semakin layak untuk dihuni	Atau Rumah Khusus Yang Terbina					
				Presentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Kantor Rusunawa	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
			Berkurangnya luasan kawasan kumuh	Presentase Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Kondisi Baik	%	41,00	66,13	161,29	Sangat Tinggi
				Presentase Panjang Drainasse Lingkungan Kondisi Baik	%	70,30	35,72	50,81081081	Sangat Rendah
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni Di Kawasan Kumuh	%	13,20	12,56	95,15	Sangat Tinggi
			Terbangunnya Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Presentase Dokumen Perencanaan Kumuh	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
				Presentase Unit Rehabilitasi Rtlh	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
			Berkurangnya jumlah RTLH	Persentase Rtlh Di Luar Kawasan Kumuh	%	10,00	2,24	22,4	Sangat Rendah
			Terlaksananya pencegahan bertambahnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh baru	Jumlah Rehabilitasi RTLH diluar Permukiman Kumuh (Peningkatan Kualitas)	Unit	80,00	74,00	92,50	Sangat Tinggi
			Meningkatnya pemeliharaan PSU Perumahan	Presentase Psu Yang Diserahkan	%	32,84	40,28	122,6685755	Sangat Tinggi
			Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU perumahan	Presentase Psu Yang Terbangun	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan			Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		Terwujudnya Peningkatan		Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah	%	83,3	100	120,0480192	Sangat Tinggi

		Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah							
			Meningkatnya fasilitasi masalah sengketa tanah aset pemerintah	Presentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah	%	100	100	100	Sangat Tinggi
			Terselesaikannya sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sengketa, Konflik & Perkara Yang Terfasilitasi	Dokumen	2	1	50	Sangat Rendah
			Meningkatnya ketersediaan data atau informasi tanah kosong	Presentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong	%	66,6	66,6	100	Sangat Tinggi
			Terlaksananya proses inventarisasi tanah kosong	Ketersediaan Data/Informasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	1	1	100	Sangat Tinggi
			Meningkatnya perencanaan penggunaan tanah	Presentase Peningkatan Penggunaan Tanah Negara	%	100	0	0	Sangat Rendah
			Terlaksananya proses penggunaan tanah dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Capaian Dokumentasi Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	0	Sangat Rendah
			Optimalisasi Pengelolaan Izin membuka tanah	Persentase Pengelolaan Tanah Negara Yang Dimanfaatkan	%	100	0	0	Sangat Rendah
			Terlaksananya penerbitan izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Membuka Tanah	Dokumen	1	0	0	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki yakni urusan, yakni:

- 1. Urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman;
- 2. Urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman memiliki tujuan “Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tertata” yang memiliki dua indikator yakni:

- 1. Persentase Kawasan Kumuh;
- 2. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata.

Tujuan dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman di atas kemudian dijabarkan menjadi sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Perumahan dan Permukiman Layak Huni” yang memiliki dua indikator, yaitu:

- 1. Rasio Rumah Layak Huni;
- 2. Cakupan Perumahan Yang Ditangani Pemerintah Daerah.

Selanjutnya tujuan yang dijabarkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada urusan pemerintahan bidang pertanahan, adalah “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan” dengan indikator “Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan”. Sasarannya adalah “Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah” dengan indikator “Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah”.

Pada sub bab ini akan dipaparkan mengenai capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digambarkan melalui capaian enam indikator di atas yang kemudian diklasifikasikan menjadi predikat kinerja pelayanan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 seperti di bawah ini:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Interval	Kinerja Pelayanan
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.1.1 Persentase Kawasan Kumuh

Luasan Kawasan kumuh di Kota Serang hingga akhir Tahun 2022 adalah sebesar 150,53 Ha dari total luasan Kawasan permukiman seluas 5.973,96 Ha atau berarti hingga akhir Tahun 2022 luasan Kawasan permukiman kumuh adalah 0,56 % atau dapat dihitung dengan formula Berikut:

$$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh Daerah Kabupaten / Kota}}{\text{Luas Wilayah Daerah Kabupaten / Kota}} \times 100 \%$$

Sehingga menghasilkan seperti pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh Daerah Kabupaten/Kota / Luas Wilayah Daerah Kabupaten/Kota * 100%	%	1,15	0,56	203,750083	Sangat Tinggi

Indikator persentase kawasan kumuh ini merupakan variable yang mana semakin tinggi realisasinya semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi maka semakin tinggi kinerjanya. Angka 0,56 % merupakan capaian yang sangat baik mengingat bahwa target di Tahun 2022 ini sebesar 1,15 %. Angka tersebut menggambarkan penurunan luasan Kawasan kumuh yang pada akhir Tahun 2021 masih seluas 162,01 Ha. Capaian tersebut tentu saja tidak lepas dari beberapa aspek yang dibangun oleh DPKP yaitu peningkatan jalan permukiman, pembangunan drainase permukiman, pembangunan jamban individu, peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh skala Kawasan, dan juga rehabilitasi RTLH. Selain itu DPKP terus berkoordinasi dan mengusulkan pembangunan-pembangunan pada sector perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman. Khusus pada pembangunan jalan lingkungan permukiman dan pemberian bantuan untuk rehabilitasi RTLH, DPKP memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Stimultan Rumah Swadaya (BSPS) dan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten.

Persentase Kawasan kumuh ini merupakan salah satu indikator yang selama periode RPJMD 2018 – 2023 ini selalu mencapai target atau bahkan melebihi target. Hal ini karena DPKP selalu berfokus pada pembangunan PSU di Kawasan permukiman kumuh khususnya pada aspek jalan lingkungan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Per Tahun					Capaian Kinerja (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Persentase Kawasan Kumuh	%	0,56	0,77	2,00	2,01	2,02		156,25	100,00	100,00	100,00	

Berdasarkan tabel di atas, pada tiga Tahun pertama dalam periode RPJMD 2018 – 2023, DPKP berhasil mencapai apa yang ditargetkan. Mulai Tahun 2021 hingga 2022 ini, DPKP justru dapat berhasil melebihi dari apa yang sudah ditargetkan. Pada Tahun 2021 tersebut, pemberlakuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah memberi pengaruh pada optimalisasi dalam aspek perencanaan dan penganggaran sehingga hal tersebut memberi pengaruh dalam hal efisiensi dan optimalisasi kinerja. Keberhasilan capaian kinerja selama empat Tahun terakhir sejak 2019 hingga 2022 ini apabila dibandingkan dengan target di akhir periode RPJMD adalah sebagai Berikut:

Tabel 3.5 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Dibandingkan dengan target akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Persentase Kawasan Kumuh	%	1,07	2,01	2	1,2	1,15		2,01	2	0,77	0,56		100,00	100,00	156,25	203,75		154,25

Pada kolom 19 pada tabel di atas diperoleh nilai sebesar 154,25 %. Hal ini menunjukkan bahwa hingga akhir Tahun 2022, apa yang sudah ditargetkan di akhir Tahun 2023 nanti sudah lebih dari tercapai. Meskipun DPKP terus melakukan pembenahan dan memberikan pelayanan prima pada sector perumahan dan Kawasan permukiman, namun bisa saja menurun di akhir Tahun 2023 nanti mengingat salah isu strategis yang dijabarkan oleh DPKP adalah penurunan kualitas lingkungan permukiman pada Kawasan kumuh. Lebih jauh apa saja dapat terjadi pada Kawasan permukiman di kota Serang mengingat ada tujuh kriteria yang dapat membuat suatu Kawasan permukiman disebut kumuh, yakni:

1. Bangunan;
2. Jalan lingkungan;
3. Penyediaan air minum;
4. Drainase lingkungan;
5. Pengelolaan air limbah;
6. Pengelolaan persampahan;
7. Proteksi kebakaran.

Pencapaian yang baik pada indikator persentase Kawasan kumuh tentu aja didukung oleh kinerja program kegiatan yang juga sama baiknya dan memperoleh predikat “Sangat Tinggi”. Pencapaian ini merupakan gambaran bahwa aspek perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan DPKP sudah optimal dan efisien meskipun dengan anggaran yang terbatas. Berikut capaian output kegiatan yang mempengaruhi pada nilai persentase Kawasan kumuh:

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kumuh Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Nama Program	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Persentase Kawasan Kumuh				%	1,15	0,56	203,75	Sangat Tinggi
		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase Dokumen Perencanaan Kumuh	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi
				Presentase Unit Rehabilitasi Rtlh	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi

3.1.2 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata

Indikator Kinerja Utama DPKP pada urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman adalah luasan Kawasan permukiman yang tertata. Luasan Kawasan permukiman yang tertata merupakan Luas area bangunan rumah yang tertata secara teratur menghadap jalan dengan kerangka jalan tertata secara bertingkat mulai dari jalan raya, penghubung hingga jalan lingkungan atau local. Sehingga persentase luasan Kawasan permukiman yang tertata dapat diperoleh dari:

$$\frac{\text{Luasan Kawasan Permukiman yang Tertata}}{\text{Luas Area Permukiman Keseluruhan}} \times 100 \%$$

Setidaknya sejak Tahun 2020, sebanyak 5.250,64 Ha dari 5.634,87 Ha atau 93,18 % merupakan luasan Kawasan permukiman yang tertata. Hal ini menggambarkan bahwa di Kota Serang Sebagian besar Kawasan permukiman adalah sudah berada dalam kondisi yang tertata berdasarkan definisi yang sudah diterangkan sebelumnya. Pada akhir Tahun 2022, sebanyak 5.769,15 Ha dari 5.973, 96 Ha merupakan luasan permukiman tertata. Sehingga capaian kinerja IKU DPKP ini meningkat menjadi 96,57 % dan memperoleh predikat kinerja pelayanan sangat tinggi seperti tergambar pada tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
Presentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata	Jumlah Luasan Permukiman yang tertata / Jumlah Luas Permukiman * 100%	%	99,38	96,57	97,17	Sangat Tinggi

Berdasarkan tugas dan fungsinya, DPKP diharapkan menghasilkan salah satu *outcome* berupa luasan Kawasan permukiman yang tertata. Hal ini selaras dengan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pelayanan pembangunan maupun pemeliharaan PSU permukiman. Seperti pada kalimat di atas bahwa sejak Tahun 2020 hingga 2022, luas Kawasan permukiman meningkat seluas 135 Ha namun DPKP terus melayani dan hal ini terlihat dari capaian kinerja yang justru meningkat meski peningkatan tersebut belum sepenuhnya optimal karena apa yang sudah ditargetkan sebesar 99,38 % justru belum tercapai. Hal ini karena luasan Kawasan permukiman yang kian meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh pertumbuhan kota dan jumlah penduduk yang kian meningkat. Selain itu, pada periode Perubahan APBD Tahun 2022 terdapat rasionalisasi anggaran sehingga berimbas kepada jumlah RTLH yang direhabilitasi, peningkatan PSU permukiman dan pembangunan maupun pemeliharaan drainase permukiman yang hanya mencapai 35,72 % dari target sebesar 70,30 % sehingga luasan yang dipugar oleh DPKP hanya sebesar 11,48 Ha, dari apa yang sudah ditargetkan yakni sebesar 16 Ha. Berikut capaian persentase luasan Kawasan permukiman tertata dari Tahun ke Tahun:

Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata Tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Per Tahun					Capaian Kinerja (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Presentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata	%	96,57	96,57	93,56	99,19	NA		97,33	100,01	106,43	NA	

3.1.3 Rasio Rumah Layak Huni

Indikator kinerja utama selanjutnya dari DPKP ialah Rasio Rumah Layak Huni. Seperti yang diketahui bahwa program prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah penanganan Kawasan permukiman kumuh, penyediaan PSU perumahan, dan rehabilitasi RTLH. Hingga akhir Tahun 2022, terdapat 21.100 unit RTLH yang tersebar di enam Kecamatan di Kota Serang dengan tingkat kerusakan yang variative dari ringan hingga berat atau sekitar 12,56 % dari seluruh rumah di Kota Serang yang berada di angka 167.930 unit. Jumlah tersebut diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh DPKP dan juga berkoordinasi dengan KOTAKU. Selama Tahun 2022, DPKP telah memberikan bantuan bagi rehabilitasi RTLH sebanyak 134 unit yang dananya bersumber dari APBD dan DAK. Selain itu pula terdapat intervensi dari BSPS sebanyak 399 unit. Meskipun capaian tersebut masih terbilang minim apabila dibandingkan dengan seluruh RTLH yang ada di Kota Serang yang mana merupakan capaian program Kawasan permukiman, namun ketercapaian pada level sub kegiatan dan pada level IKU rasio rumah layak huni justru tercapai. Berikut capaian kinerja indikator rasio rumah layak huni:

Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Kinerja Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah seluruh Rumah Tinggal	Rasio	0,8679	0,874	100,74	Sangat Tinggi

Mengingat jumlah RTLH di wilayah Kota Serang yang kian tinggi, pada periode 2018 – 2023 ini DPKP tidak menetapkan target kinerja yang terlalu tinggi sehingga dapat terus direalisasikan dan dicapai dengan angka persentase ketercapaian yang tinggi. Berikut capaian kinerja DPKP dalam mewujudkan rumah layak huni:

Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Per Tahun					Capaian Kinerja (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,874	0,871	0,871	0,867	0,970		100,40	89,59	89,38	100,00	

Pada tabel di atas, setidaknya 89 % dari apa yang sudah ditargetkan oleh DPKP dalam meningkatkan rasio rumah layak huni di Kota Serang dapat dicapai. Dalam prosesnya DPKP melakukan intervensi layanan dalam bentuk pemberian bantuan guna rehabilitasi RTLH, rehabilitasi rumah korban bencana, dan pemberian bantuan social untuk pembangunan jamban individu. Pada Tahun 2022 ini, sebanyak 89 rumah korban bencana diberikan bantuan untuk proses rehabilitasi, 134 rumah tidak layak huni mendapat bantuan untuk rehabilitasi, dan juga sebanyak 79 unit jamban sudah terbangun di rumah-rumah warga.

3.1.4 Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah

Indikator kinerja utama dalam sector perumahan adalah cakupan perumahan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Formulasi untuk menghitung capaian ini adalah sebagai Berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pengembang yang sudah menyerahkan asetnya}}{\text{Jumlah pengembang yang ada di Kota Serang}} \times 100 \%$$

Berikut capaian cakupan perumahan yang ditangani oleh pemerintah daerah Tahun 2022:

Tabel 3.11 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Perumahan yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Pengembang yang sudah Menyerahkan Asetnya / Jumlah Pengembang yang ada di Kabupaten/Kota * 100 %	%	32,84	40,28	122,67	Sangat Tinggi

Terdapat 85 dari 211 atau 40,28 % pengembang yang telah menyerahkan aset PSU nya. Hal ini merupakan angka yang impresif mengingat target di Tahun 2022 ini hanya 30,35 %. Bidang Perumahan bekerja pada sector pemeliharaan dan peningkatan PSU perumahan, pemberian bantuan bagi korban bencana yang juga merupakan SPM di DPKP, selain itu bidang perumahan pun membawahi UPTD Rusunawa yang bertanggung jawab atas pemungutan retribusi sewa di 3 tower Rusunawa yang berlokasi di Kaujon dan Margaluyu. Sejak Tahun 2019 DPKP terus melakukan sosialisasi kepada pengembang dan perangkat masyarakat terkait penyerahan aset PSU perumahan kepada pemerintah daerah. Karena Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya dapat melaksanakan pembangunan maupun pemeliharaan Ketika aset PSU nya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Berikut capaian kinerja cakupan perumahan yang ditangani oleh pemerintah daerah dari Tahun ke Tahun:

Tabel 3.12 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Perumahan yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Per Tahun					Capaian Kinerja (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah	%	40,28	34,16	27,90	28,72			112,55	55,80	63,82	NA	

Terlihat pada tabel di atas bahwa semakin tinggi pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun pengembang untuk menyerahkan aset PSU nya kepada Pemerintah Daerah melalui DPKP agar pemeliharaan dan pembangunan PSU sebagai sarana penunjang fungsi hunian dapat terus terjaga. Proses penyerahan aset PSU ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, dari mulai sosialisasi, koordinasi, verifikasi lapangan, kemudian penandatanganan berita acara serah Terima. Berikut data perumahan yang sudah menyerahkan aset PSU nya:

Tabel 3.13 Data Perumahan yang Sudah Menyerahkan Aset PSU nya

NO.	NAMA PERUMAHAN	TAHUN PEROLEHAN	
1	Komp. Perumnas	1992	
2	Bumi Agung Permai I	2007	
3	Taman Graha Asri Tahap 1	2010	
	Taman Graha Asri Tahap 2	2021	
4	Persada Banten Tahap 1	2011	
	Persada Banten Tahap 2	2014	

	Persada Banten Tahap 3	2017	
5	Citra Gading	2012	
6	Taman Angsoka Permai	2013	
7	Taman Banten Lestari Tahap 1	2013	
	Taman Banten Lestari Tahap 2	2019	
8	Taman Cimuncang Indah	2013	
9	Taman Mutiara Indah	2013	
10	Griya Lopang Indah	2013	
11	Taman Pipitan Indah	2013	
12	Titan Arum	2014	
13	Graha Griya Wahana Walantaka	2013	
14	Taman Banjar Agung Indah	2013	
15	Mandala Citra Indah	2010	
16	Taman Puri Indah	2012	
17	Bumi Mukti Indah	2013	
18	Taman Lopang Indah	2012	
19	Puri Cipta Pipitan	2015	
20	Permata Syafira Regency	2014	

21	Banten Indah Permai Tahap 1	2017	
	Banten Indah Permai Tahap 2	2019	
	Banten Indah Permai Tahap 3	2021	
22	Bumi Agung Permai II	2017	
23	Grand Apple Residence	2017	
24	Permata Banjar Asri Tahap 1	2017	
	Permata Banjar Asri Tahap 2	2018	
25	Puri Delta Serang	2017	
26	Banjar Sari Permai	2018	
27	Bukit Permai	2018	
28	Bumi Serang Baru	2018	
29	Kidemang Unyur	2018	
30	Rahayu Residence	2018	
31	RSS Kodam III Siliwangi (Komplek Korem)	2018	
32	Komp. Taman Asri	2019	
33	Kiara Garden	2019	
34	Lebak Indah	2019	
35	Komp. Depag	2019	

36	Taman Ciruas Permai Tahap 1	2019	
	Taman Ciruas Permai Tahap 2	2021	
37	Grand Sutera Serang	2019	
38	Puri Kartika Banjarsari	2019	
39	Ciruas Land	2019	
40	Komp. Untirta Permai	2019	
41	Ciceri Permai	2019	
42	Puri Anggrek	2019	
43	Serang City	2019	
44	Puspa Regency	2019	
45	Griya Ciracas Indah	2019	
46	Puri Delta Kiara Tahap 1	2019	
	Puri Delta Kiara Tahap 2	2021	
47	Sepang Elok	2019	
48	Rss Pemda	2019	
49	Taman Wijaya Permai	2020	
50	Griya Gemilang Sakti	2020	
51	Permata Serang	2020	

52	Puri Delta Angsana	2020	
53	Sukawana Asri	2020	
54	P & K	2020	
55	Puri Serang Hijau	2020	
56	Mayabon Village	2020	
57	Highland Park	2021	
58	Harmony Residence	2021	
59	Bukit Mas Residence	2021	
60	Puri Kanaka Griya Asri	2021	
61	Taman Widya Asri Tahap 1 & 2	2021	
62	Taman Pesona Residence	2021	
63	Taman Pesona Residence	2021	
64	Puri Delta Extension	2021	
65	Griya Reang Indah	2021	
66	Grand Sukawana	2021	
67	Puri Cempaka	2021	
68	Griya Permata Asri	2021	
69	Queen Garden	2021	

70	Gedong Kaloran	2022	
71	Taman Alam Lestari	2022	
72	Graha Dalung Residence	2022	
73	Pondok Walantaka	2022	
74	Bumi Serang Damai	2022	
75	Pesona Sepang	2022	
76	Komplek Pemda dan Abri	2022	
77	Bumi Sari Permai	2022	
78	The Green Bringin Residence	2022	
79	Komplek Ciceri Indah	2022	
80	Taman Krissan	2022	
81	Karisma Gelam Asri	2022	
82	Bumi Lipatik Lestari	2022	
83	Pondok Angsana Indah 1&2	2022	
84	Pesona Kasemen	2022	
85	Bumi Sepang Indah	2022	

3.1.5 Cakupan Layanan Adminsistrasi Pertanahan

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah “Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan”. Indikator ini terdiri dari dua data pendukung yakni jumlah realisasi pelayanan pertanahan, dan jumlah target layanan pertanahan. Kedua data pendukung tersebut berbentuk dokumen. Adapun formulasi perhitungannya adalah sebagai Berikut:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi pelayanan pertanahan}}{\text{jumlah target layanan pertanahan}} \times 100 \%$$

Mengingat bahwa bidang pertanahan adalah bidang yang baru terbentuk pada Tahun 2021, maka dari itu pada Tahun 2022, DPKP melalui bidang pertanahan menetapkan target layanan pertanahan sebanyak satu dokumen, dan terrealisasi sebanyak satu dokumen:

Tabel 3.14 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	Jumlah Realisasi Pelayanan Pertanahan / Jumlah Target Layanan Pertanahan * 100%	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Tabel 3.15 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan Tahun 2018 – 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kondisi Akhir RPJMD	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)					Dibandingkan dengan target akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	%	100	-	-	100	100,00		-	-	100	100,00		-	-	100	100,00		100,00

Tabel 3.16 Pencapaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan Tahun 2018 - 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Per Tahun					Capaian Kinerja (%)				
			2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	%	100,00	100,00	-	-	-		100,00	-	-	-	

3.1.6 Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

indikator kinerja utama yang kedua dari urusan pertanahan adalah capaian peningkatan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Capaian indikator ini tidak terlepas dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang Pertanahan. Perhitungan capaian indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Peningkatan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah}}{\text{Jumlah Target Peningkatan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah}} \times 100\%$$

Bidang Pertanahan memiliki 4 program di Tahun 2022, yakni:

- 1. Program Penyelesaian Sengketa Garapan;
- 2. Program Pengelolaan Tanah Kosong;

- 3. Program Penatagunaan Tanah;
- 4. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.

Tahun 2022 ini DPKP menetapkan target peningkatan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebanyak 1 dokumen. Output dari indikator ini pun satu dokumen, maka capaiannya adalah sebagai Berikut:

Tabel 3.17 Pencapaian Indikator Capaian Peningkatan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7
Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	Jumlah Realisasi Pelayanan Pertanahan / Jumlah Target Layanan Pertanahan * 100%	%	100	100,00	100,00	Sangat Tinggi

Meski begitu, bidang pertanahan juga menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan program kegiatannya. Beberapa kendala tersebut adalah

- 1. Capaian laporan sengketa, konflik, perkara, yang terfasilitasi.
Tahun 2022, salah satu kegiatan yang dilaksanakan bidang pertanahan adalah inventarisasi sengketa, konflik dan perkara terkait pertanahan. Proses inventarisasi tersebut dilakukan melalui rapat sosialisasi dan juga koordinasi. Namun hanya terdapat 1 dokumen atau laporan yang ditangani oleh bidang pertanahan berdasarkan pengaduan masyarakat dari sebanyak 2 dokumen yang ditargetkan.
- 2. Capaian dokumen penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota.
Sedianya kegiatan ini salah satunya direncanakan sebagai kegiatan perencanaan pengadaan tanah di 4 lokasi yakni, tanah akses wisata pasir putih, tanah untuk flyover trondol – kaligandu, tanah jalan cilowong – gedeg, dan tanah jalan curug – cisangku, namun karena rasionalisasi anggaran membuat perencanaan ini dialihkan ke Tahun anggaran 2023, dan pada Tahun 2022 bidang pertanahan melakukan belanja modal tanah untuk kantor kelurahan Cigoong.

3. Capaian persentase pengelolaan tanah negara yang dimanfaatkan dan Capaian jumlah dokumen rekomendasi izin membuka tanah.

Kedua kegiatan ini berada dalam program yang sama yakni program pengelolaan izin membuka tanah. Kegiatan ini mulanya bertujuan agar masyarakat yang dapat mengurus izin lokasi dan izin membuka tanah di Kota Serang. Proses sosialisasi kepada masyarakat melalui rapat-rapat koordinasi sudah dilaksanakan, namun kewenangan mengenai izin lokasi dan izin membuka tanah ini ternyata berada di bawah kewenangan DPMPTSP.

3.2 Realisasi Anggaran

Dari baiknya kinerja DPKP selama tiga tahun terakhir dalam mewujudkan Kawasan perumahan dan permukiman tertata tidak terlepas dari jumlah anggaran yang diserap dari tahun ke tahun. Selama Tahun 2022, DPKP menghabiskan anggaran sebesar Rp 67.061.523.546 dari Rp 69.061.787.049 atau 97,10 % yang terbagi menjadi tiga hal yakni:

- 1. Urusan perumahan dan permukiman: Rp 57.455.603.514
- 2. Urusan pertanahan: Rp 1.748.482.500
- 3. Urusan kesekretariatan: Rp 7.857.437.532

Rincian anggaran secara spesifik dapat dilihat pada tabel 3.18 di bawah. Secara umum, penyebab dari lemahnya penyerapan anggaran adalah sama seperti apa yang telah dipaparkan pada point-point sebelumnya. Kinerja yang kian membaik dari tahun ke tahun tidak sepenuhnya identic dengan jumlah anggaran yang diserap.

Tabel 3.18 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program	Target	Realisasi	Capaian	Ket
			Kegiatan	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
				69.053.787.049	67.061.523.546	97,11	
	NON URUSAN			7.955.467.898	7.857.437.532	98,77	
	Terwujudnya Kawasan Perumahan Dan Permukiman Tertata			59.198.891.151	57.455.603.514	97,06	
		Meningkatnya Pengelolaan Perumahan Dan Permukiman Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	1.346.170.000	1.342.469.135	99,73	

			Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	66.170.000	65.870.000	99,55	
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/Atau Rumah Khusus	1.280.000.000	1.276.599.135	99,73	
			Program Kawasan Permukiman	13.789.029.583	13.449.400.038	97,54	
			Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	244.795.000	237.454.000	97,00	
			Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	13.544.234.583	13.211.946.038	97,55	
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	11.207.825.810	10.838.920.373	96,71	
			Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	11.207.825.810	10.838.920.373	96,71	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	32.855.865.758	31.824.813.968	96,86	
			Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan	32.855.865.758	31.824.813.968	96,86	
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan			1.899.428.000	1.748.482.500	92,05	
		Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah	918.250.000	912.003.500	99,32	
			Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kab/Kota	918.250.000	912.003.500	99,32	

			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	336.204.000	304.375.000	90,53	
			Penertiban Izin Membuka Tanah	336.204.000	304.375.000	90,53	
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	457.143.000	361.980.000	79,18	
			Infentarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Kosong	457.143.000	361.980.000	79,18	
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	187.831.000	170.124.000	90,57	
			Penyelesain Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kab/Kota	187.831.000	170.124.000	90,57	

Dan Berikut tingkat efisiensi penggunaan anggaran oleh DPKP selama Tahun 2022:

Tabel 3.19 Pencapaian Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran dengan Kinerja Tahun 2022

N o	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satua n	Target		Kinerja		Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)	Stat us
						Kine rja	Anggaran	Real isasi	Capa ian (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Terwuj dnya Kawasa n Peruma han Dan Permuki			Persentase Kawasan Kumuh	%	1,15	59.198.891.151	0,56	203,75	57.455.603.514	97,0552022 1	2,94	

	man Tertata												
				Presentase Luasan Kawasan Permukiman Yang Tertata	%	99,3 8		96,57	97,17				
		Meningk atnya Pengelol aan Perumah an Dan Permuki man Layak Huni		Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,86 75		0,87	100,79				
				Cakupan Perumahan Yang Ditangani Oleh Pemerintah Daerah	%	30,3 5		40,28	132,73				
			Program Pengemb angan Perumah an	Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung Rusunawa	%	62,5 0		52,08	83,33				
				Presentase Rumah Yang Diperbaiki Akibat Bencana	%	40,0 0	1.346.170.000	117,1 1	292,76	1.342.469.135	99,73	0,27	
			Program Kawasan Permuki man	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Di Kawasan Kumuh	%	13,2 0		2,53	19,14				
				Presentase Panjang Jalan Lingkungan Permukiman Kondisi Baik	%	41,0 0	13.789.029.583	66,13	161,28	13.449.400.038	0,97536958 3	2,46	
				Presentase Panjang Drainasse Lingkungan Kondisi Baik	%	70,3 0		35,72	50,82				
			Program Perumah an Dan	Persentase Rtlh Di Luar Kawasan Kumuh	%	10,0 0	11.207.825.810	2,24	22,40	10.838.920.373	0,96708501 3	3,29	

			Kawasan Permukiman Kumuh										
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Presentase Psu Yang Diserahkan	%	32,84	32.855.865.758	40,28	122,66	31.824.813.968	0,968618943	3,14	
	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan			Cakupan Layanan Administrasi Pertanahan	%	100,00	1.899.428.000	100,00	100,00	1.748.482.500	92,05310757	7,95	
	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Dalam Hal Penatagunaan Tanah			Capaian Peningkatan Penguasaan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Tanah	%	66,60		100,00	150,15				
			Program Penyelesaian Tanah	Presentase Fasilitas Penyelesaian Konflik Sengketa Tanah	%	100,00	187.831.000	100,00	100,00	170.124.000	0,91	9,43	

			Sengketa Garapan										
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	Presentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong	%	66,60	457.143.000	66,60	100,00	361.980.000	0,79	20,82	
			Program Penatagunaan Tanah	Presentase Peningkatan Penggunaan Tanah Negara	Dokumen	100,00	918.250.000	0,00	0,00	912.003.500	0,99	0,68	
			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Pengelolaan Tanah Negara Yang Dimanfaatkan	%	100,00	336.204.000	0,00	0,00	304.375.000	0,91	9,47	

3.3 Penghargaan

Selama Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memperoleh penghargaan dari KPP Pratama Serang Barat atas kepatuhan pelaporan SPT Masa Terbaik Ketiga Kategori Instansi Pemerintah Tingkat Kota Serang selama Tahun Pajak 2022.

Gambar 3.1 Piagam Penghargaan



BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI EVALUASI TAHUN 2020

Pada tahun 2020 lalu, terdapat hal-hal yang direkomendasikan oleh Inspektorat terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja. Atas rekomendasi tersebut, DPKP terus melakukan improvisasi demi memberikan pelayanan kepada public secara lebih baik. Pada tabel 4.1 di bawah diterangkan rincian rekomendasi Inspektorat dan tindak lanjutnya.

Tabel 4.1 Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat

No	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	
a	Dokumen Renstra agar dipublikasikan baik melalui website Pemerintah maupun media lain sehingga memudahkan publik untuk mengakses dan mengetahui informasi tentang rencana program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun;	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPKP sudah dipublikasikan melalui halaman <i>website</i> resmi yakni <i>disperkim.serangkota.go.id</i> . <i>evidence</i> akan dilampirkan pada bagian lampiran laporan ini.
b	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) agar dipublikasikan baik melalui website Pemerintah maupun media lain sehingga memudahkan publik untuk mengakses dan mengetahui informasi tentang komitmen DPRPKP dalam mewujudkan capaian sasaran strategis yang diperjanjikan;	Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) DPKP sudah dipublikasikan melalui halaman <i>website</i> resmi yakni <i>disperkim.serangkota.go.id</i> . <i>evidence</i> akan dilampirkan pada bagian lampiran laporan ini.
c	Agar pencapaian target-target kinerja sasaran menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran.	-
2	Pengukuran Kinerja	
a	Agar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku mengenai mekanisme pengumpulan data kinerja yang dibutuhkan dalam penyusunan LkjIP;	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dibuat. <i>evidence</i> akan dilampirkan pada bagian lampiran laporan ini.
b	Dokumen IKU agar dipublikasikan baik melalui website Pemerintah maupun media lain sehingga memudahkan publik untuk mengakses serta mengetahui informasi tentang ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis DPRPKP;	Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) DPKP sudah dipublikasikan melalui halaman <i>website</i> resmi yakni <i>disperkim.serangkota.go.id</i> . <i>evidence</i> akan dilampirkan pada bagian lampiran laporan ini.
c	Agar seluruh target dalam Rencana Aksi diukur realisasinya secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);	Pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja dilakukan setiap triwulan dan disampaikan kepada Bappeda dan Sekretariat Daerah bagian Organisasi.
d	Pengukuran Kinerja agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;	Di internal sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan memanfaatkan sarana perangkat lunak Microsoft excel sebagai template laporan pengukuran kinerja yang sudah dilengkapi dengan formulasi sesuai dengan renstra yang kemudian dibagikan dan diisi oleh masing-masing bidang
e	Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment	-
3	Pelaporan Kinerja	

a	Dokumen Pelaporan Kinerja agar dipublikasikan baik melalui website Pemerintah maupun media lain sehingga memudahkan publik untuk mengakses dan mengetahui tentang pencapaian sasaran strategis / capaian kinerja yang telah ditetapkan;	Dokumen Pelaporan Kinerja DPKP sudah dipublikasikan melalui halaman <i>website</i> resmi yakni <i>disperkim.serangkota.go.id</i> . <i>evidence</i> akan dilampirkan pada bagian lampiran laporan ini.
b	Agar menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan..	Data kinerja sudah dilampirkan pada tabel 3.4, 3.5, 3.8, 3.10, 3.12, 3.15, 3.16 pada laporan ini.
C	Laporan Kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	Sudah disajikan pada sub bab 3.2
D	Informasi kinerja dalam laporan kinerja agar dapat menyajikan / memberikan penjelasan mengenai data yang disampaikan apakah cukup valid, dapat ditelusuri sumber datanya, berdasarkan dari sumber yang kompeten dan dapat diverifikasi	Di dalam paparan pada bab 3, terdapat pernyataan dari mana data tersebut diperoleh.
E	Laporan kinerja yang disajikan agar dapat menyajikan / memberikan gambaran mengenai apakah informasi kinerja telah dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga bermanfaat dalam peningkatan kinerja organisasi	-

BAB V

PENUTUP

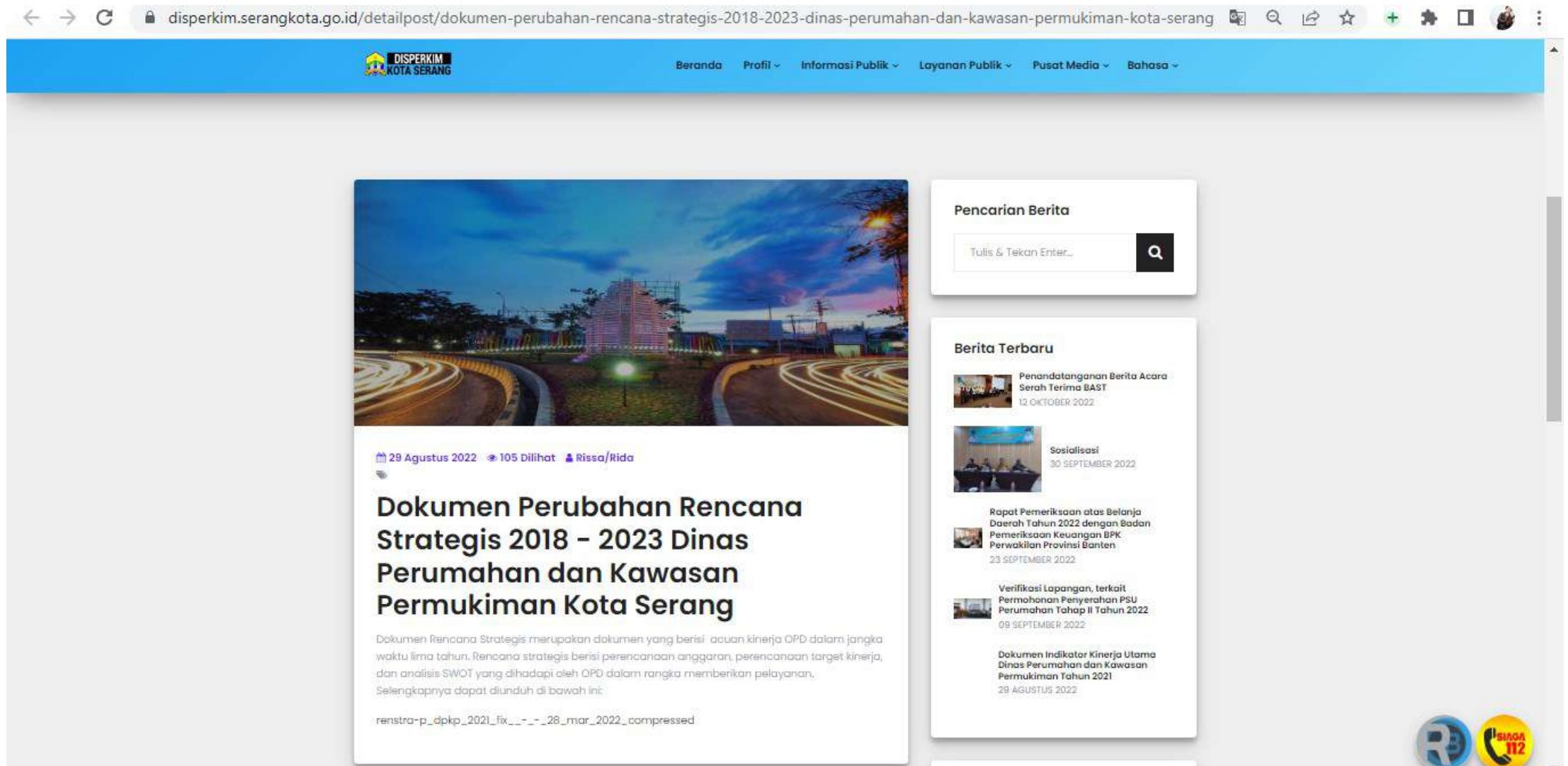
Sebagai bagian penutup dari LKjIP Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 dapat dicapai. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi Pemerintah Kota Serang secara keseluruhan untuk melaksanakan amanat Peraturan Walikota Serang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang. Selain dari keberhasilan secara keseluruhan di atas dalam Tahun 2022 juga terdapat belum optimalnya capaian kinerja, atau masih di bawah dari target yang ditetapkan.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang belum telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2022 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Serang, dan seluruh pihak-pihak terkait (*stakeholders*) lainnya dalam merumuskan kebijakan urusan perumahan dan kawasan pemukiman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan urusan perumahan dan kawasan pemukiman di Pemerintah Kota Serang;
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan.
3. Optimalisasi waktu pelaksanaan seluruh kegiatan yang berpatokan kepada rencana aksi, baik dari sisi pemilihan waktu pelaksanaannya ataupun durasi pelaksanaannya.

LAMPIRAN

Dokumen Rencana Strategis yang sudah diunggah ke dalam halaman *website* disperkim.serangkota.go.id



Dokumen Perjanjian Kinerja yang sudah diunggah ke dalam halaman *website* disperkim.serangkota.go.id

The screenshot shows a web browser window with the URL disperkim.serangkota.go.id/detailpost/dokumen-perjanjian-kinerja-dinas-perumahan-dan-kawasan-permukiman-tahun-2021. The website has a blue header with the logo 'DISPERKIM KOTA SERANG' and navigation links: Beranda, Profil, Informasi Publik, Layanan Publik, Pusat Media, and Bahasa. Below the header is a large purple banner with the title 'Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021'. The main content area features a preview of the document, dated 29 Agustus 2022, with 59 views, by Rissa/Rida. The document title is 'Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021'. The text describes the purpose of the document: 'Dalam rangka memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, setiap OPD diwajibkan untuk mendokumentasikan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu tahun berjalan beserta indikator dan targetnya. Selengkapnya dapat diunduh pada link di bawah ini: pk_perubahan_2021_dpdp_-_31_mar_2022_compressed'. To the right of the document preview is a 'Pencarian Berita' (News Search) box with a search bar and a magnifying glass icon. Below that is a 'Berita Terbaru' (Latest News) section with two items: 'Penandatanganan Berita Acara Serah Terima BAST' dated 12 OKTOBER 2022, and 'Sosialisasi' dated 30 SEPTEMBER 2022. At the bottom right, there are two circular icons: one with a blue 'R' and another with a yellow '112' and the word 'SANGA'.

Dokumen Indikator Kinerja Utama yang sudah diunggah ke dalam halaman *website* disperkim.serangkota.go.id

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

 Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

 29 Agustus 2022  81 Dilihat  Rissa/Rida

Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

Dokumen Indikator Kinerja Utama merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan dalam rangka pencapaian visi dan misi DPKP yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan.

Selengkapnya dapat diunduh pada link di bawah ini:

[iku_\(indikator_kinerja_utama\)_perubahan_dpkp_2021_---_30_mar_2022](#)

Pencarian Berita

Tulis & Tekan Enter...



Berita Terbaru



Penandatanganan Berita Acara Serah Terima BAST
12 OKTOBER 2022



Sosialisasi
30 SEPTEMBER 2022





PEMERINTAH KOTA SERANG

SEKRETARIAT DAERAH

**SUBBAGIAN KEUANGAN, PROGRAM, EVALUASI DAN
PELAPORAN**

Dasar Hukum

- Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Walikota Serang nomor 29 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Serang nomor 50 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Keterkaitan dengan SOP lain

Nomor

01.02.14.2019

Tanggal Pembuatan

09 Mei 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

10 Juni 2019

Di sahkan oleh

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Nama SOP

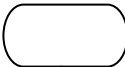
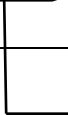
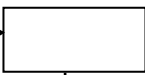
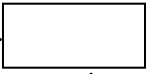
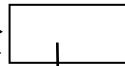
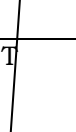
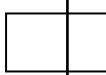
Mekanisme Penyusunan LKJiP

Kualifikasi Pelaksana

- Mengetahui tugas dan fungsi seksi subbag PEP
- Mampu mengoperasikan komputer
- Memiliki keterampilan sebagai pengadministrasi

Peralatan / Perlengkapan

	- ATK - Komputer - Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan / Dokumentasi
Penyusunan LKJiP dilakukan setiap akhir tahun	- Data dicatat dan di rekap - Pendokumentasian

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Kepala OPD	Sekretaris	Kasubag PEP	Bidang	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendisposisi Surat Edaran Penyusunan LKJiP OPD						Lembar Disposisi & Surat Edaran	5 menit	Disposisi dan surat edaran	
2.	Menganalisis Surat Perintah Pembuatan LKJiP OPD						disposisi Surat Edaran Penyusunan LKJiP	30 menit	Surat edaran penyusunan LKJiP	
3.	Menerima dan Mengedarkan Surat Pembuatan LKJiP Ke Bidang						Surat Edaran Penyusunan LKJiP	30 menit	Surat edaran penyusunan LKJiP	
4.	Menyusun Draft LKJiP Bidang						Surat Edaran Penyusunan LKJiP	5 hari	Draft LKJiP Bagian	
5.	Mengumpulkan LKJiP Bidang dan Menyusun LKJiP OPD						Draft LKJiP Bidang	5 hari	Draft LKJiP OPD	



6.	Paraf Draft LKjIP OPD	T			Y			Draft LKJiP Bidang	5 hari	Draft LKJiP OPD	
7.	paraf Draft LKjIP OPD			Y				Drfat LKJiP OPD	3jam	Draft LKJiP OPD	
8.	Penandatanganan Dokumen LKjIP							LKJiP OPD	3 jam	LKJiP OPD disahkan	
9.	Menggandakan, mengarsipkan dan menyampaikan LKjIP OPD ke unit terkait							LKJiP OPD	1 hari	LKJiP OPD terkirim	

**KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SERANG**

IWAN SUNARDI, ST, MM

NIP. 19770902 200312 1 005

